



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PETA JALAN SANITASI SEKOLAH DALAM KERANGKA UKS 2017



Diterbitkan oleh:
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017

Didukung oleh: UNICEF
Bekerjasama dengan Jejaring AMPL, SNV, Wahana Visi Indonesia, SPEAK Indonesia,
Plan International Indonesia, GIZ Fit for School dan CARE Indonesia

ISBN 978-602-1389-35-5





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PETA JALAN SANITASI SEKOLAH DALAM KERANGKA UKS 2017



Peta Jalan Sanitasi Sekolah Dalam Kerangka UKS 2017

ISBN : 978-602-1389-35-5

Ukuran Buku : 16,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: xii + 102 Halaman

Tim Penyusun:

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Pengarah:

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

Penulis:

- Ditjen Dikdasmen Kemendikbud: Yudistira Wahyu, Satriyo Wibowo, Agung Tri Wahyunto, Edhi Prasetyo, Susetyo Widiasmoro, Donny Putranto, Untung Wismono, Hastuti Mustikaningsih, Agrichynthia Pratiwi, Agustin Wardhani

- PDSPK Kemendikbud : Siti Sofiah

- Biro PKLN Kemendikbud : Fahturahman

- Unicef : Reza Hendrawan, Aline Ardhiani

Diterbitkan oleh:

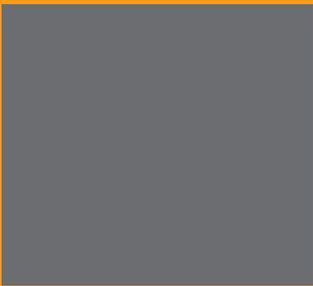
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017

Dokumen ini bebas untuk dikaji, diabstraksikan, diperbanyak dan diterjemahkan baik sebagian maupun keseluruhannya, namun tidak dapat diperjualbelikan maupun digunakan untuk tujuan komersil.

Untuk kutipan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peta Jalan Sanitasi Sekolah Dalam Kerangka UKS 2017: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Didukung oleh: UNICEF

Bekerjasama dengan Jejaring AMPL, SNV, Wahana Visi Indonesia, SPEAK Indonesia, Plan International Indonesia, GIZ Fit for School dan CARE Indonesia



Kata Pengantar

Dalam kurun waktu 2015-2019, Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya dalam pembangunan sanitasi dengan mencanangkan beberapa target penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bidang Permukiman dan Perumahan yakni 100% akses air bersih, 0% daerah kumuh, dan 100% akses jamban. Pada dokumen RPJMN tentang Agenda Pembangunan Nasional, disebutkan salah satu strategi dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi adalah sinergi dan koordinasi antarpelaku program dan kegiatan, mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk sinergi dengan pelaksanaan Sanitasi Sekolah.

Ketersediaan Sanitasi Sekolah yang memadai akan memberikan dampak yang luar biasa pada beberapa indikator utama dalam pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, ekonomi, serta air dan sanitasi. Pada sektor kesehatan, kegiatan sederhana seperti cuci tangan pakai pakai sabun (CTPS) dapat menurunkan risiko terkena penyakit diare hingga 47%. Pembiasaan CTPS secara rutin dapat menurunkan angka ketidakhadiran secara signifikan hingga 50%.

Sanitasi Sekolah juga merupakan salah satu prioritas pembangunan yang sesuai dengan Tujuan 4a SDGs. Tiga dari beberapa indikator Tujuan 4a adalah ketersediaan akses pada sumber air layak, fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, dan fasilitas cuci

tangan. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur Standar Sarana Prasarana SD/MI, SMP/ MTs, SMA/MA dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMSLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), juga mencantumkan syarat ketersediaan jamban untuk siswa dan siswi pada setiap jenjang sekolah.

Pemerintah dan pemerintah daerah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimanapun, amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tidak terbatas pada pemberian akses pendidikan. Pemenuhan turunannya yaitu, antara lain, jaminan ketersediaan sanitasi sekolah yang memadai, merupakan kewajiban negara yang harus ditunaikan. Peserta didik akan cerdas jika akses dan fasilitas pendidikan terpenuhi.

Buku ini menjelaskan secara rinci ruang lingkup dan segala hal terkait sanitasi sekolah. Buku ini dapat menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan, baik di kalangan internal maupun eksternal Kemendikbud, untuk melakukan kontribusi terhadap program sanitasi sekolah. Kami meyakini, program ini akan berhasil dan mencapai manfaat sebesar-besarnya jika semua pemangku kepentingan bersinergi dan berkolaborasi. Selamat membaca!

Jakarta, November 2017

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah



Hamid Muhammad
NIP. 195905121983111001

Daftar Isi



Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	x
Daftar Singkatan	xi
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Definisi Sanitasi Sekolah	1
1.2 Pentingnya Sanitasi Sekolah	2
1.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	3
1.4 Sanitasi Sekolah Dalam RPJMN Tahun 2015-2019	5
1.5 Indikator Sanitasi Sekolah	5
1.6 Standar Nasional Sanitasi Sekolah	6
1.7 Ruang Lingkup Penyusunan Peta Jalan Sanitasi Sekolah	9
1.7.1 Pengertian Peta Jalan	9
1.7.2 Tujuan	10
1.7.3 Landasan Hukum	10
Bab 2 Analisis Situasi dan Kondisi Sanitasi Sekolah di Indonesia	13
2.1 Gambaran Kondisi Sanitasi Sekolah Tahun 2017	13
2.1.1 Akses Air	14
2.1.2 Akses Jamban	17
2.1.3 Akses Sarana Cuci Tangan	20
2.2 Analisis Situasi Tata Kelola Sanitasi Sekolah Tahun 2017	24
2.3 Potret Kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah	34
2.3.1 Sejarah Kegiatan Sanitasi Sekolah	34
2.3.2 Kegiatan Sanitasi Sekolah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	35
2.3.3 Kegiatan Sanitasi Sekolah di Kementerian lain	41
2.3.4 Kegiatan Sanitasi Sekolah oleh Pemerintah Daerah	48
2.3.5 Kegiatan Sanitasi Sekolah di lembaga non-pemerintah	50

Bab 3 <i>Baseline, Milestone</i> dan Target Sanitasi Sekolah	59
3.1 Baseline Indikator Sanitasi Sekolah Tahun 2017	59
3.1.1 <i>Baseline</i> Sekolah Dasar	59
3.1.2 <i>Baseline</i> Sekolah Menengah Pertama	60
3.1.3 <i>Baseline</i> Sekolah Menengah Atas	60
3.1.4 <i>Baseline</i> Sekolah Menengah Kejuruan	61
3.1.5 <i>Baseline</i> Pendidikan Luar Biasa	61
3.2 Milestone dan Target Indikator Utama Sanitasi Sekolah	62
3.3 Simulasi Investasi Pencapaian Target Sanitasi Sekolah	63
Bab 4 Konsep Sanitasi Sekolah	65
4.1 Komponen Supply (Peningkatan Kebutuhan Sarana Sanitasi Sekolah)	66
4.1.1 Penyediaan sarana Jamban Sekolah	67
4.1.2 Penyediaan sarana air bersih	67
4.1.3 Penyediaan fasilitas cuci tangan	68
4.1.4 Sarana tempat sampah	68
4.1.5 Penyediaan saluran pembuangan air kotor	69
4.2 Komponen Demand (Peningkatan Penyediaan Pendidikan Higienitas di Sekolah)	69
4.2.1 Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)	70
4.2.2 Buang Air Besar (BAB) di Jamban Sekolah	70
4.2.3 Membuang sampah pada tempatnya	70
4.2.4 Manajemen Kebersihan Menstruasi	71
4.2.5 Air minum yang aman	71
4.3 Komponen Manajemen Sanitasi Berbasis Sekolah	72
4.3.1 Rencana kerja sekolah	72
4.3.2 Operasional dan pemeliharaan	72
4.3.3 Peran serta masyarakat	72
4.4 Prinsip Dasar dan Pendekatan Pembangunan Sanitasi Sekolah	73
4.4.1 Partisipatif dan Tanggap Kebutuhan	74
4.4.2 Terpadu	74
4.4.3 Komprehensif dan Bagian dari Pendidikan Karakter	75
4.4.4 Peka Kebutuhan Anak	75
4.4.5 Kemitraan	76

Bab 5 Visi, Misi dan Kegiatan Strategis Pengembangan Kelembagaan	77
5.1 Visi dan Misi	77
5.2 Strategi Pengembangan Sanitasi Sekolah	79
5.2.1 Pengembangan Kebijakan	80
5.2.2 Kelembagaan	81
5.2.3 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	82
5.2.4 Perencanaan dan Pembiayaan	83
5.2.5 Peningkatan Kapasitas	83
5.3 Kegiatan dan Target Jangka Pendek	88
5.4 Kegiatan Kelembagaan Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSD	90
5.5 Kegiatan Kelembagaan Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSMP	91
5.6 Kegiatan Kelembagaan Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSMK	93
5.7 Kegiatan Kelembagaan Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSMA	94
5.8 Kegiatan Kelembagaan Sanitasi Sekolah pada Direktorat PKLK	96
Bab 6 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Sanitasi Sekolah	99

Daftar Gambar



Gambar 1.1	Alur Sanitasi Sekolah	3
Gambar 1.2	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	4
Gambar 1.3	Operasional Indikator Sanitasi Sekolah dalam SDGs	6
Gambar 2.1	Sejarah Perkembangan Sanitasi Sekolah di Indonesia	35
Gambar 4.1	Konsep Sanitasi Sekolah	66
Gambar 4.2	Prinsip Pengembangan Sanitasi Sekolah	73
Gambar 5.1	Visi, Misi dan Strategi Pengembangan Sanitasi Sekolah	78
Gambar 5.2	Kerangka Konsep Tata Kelola Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	80

Daftar Tabel



Tabel 1.1 Standar Sanitasi Nasional Sekolah dan Madrasah	7
Tabel 1.2 Standar Sanitasi Nasional Sekolah Luar Biasa	8
Tabel 1.3 Target RPJMN Sekolah dengan sarana dan prasarana sesuai SNP	9
Tabel 2.1 Kondisi Sanitasi Sekolah Tahun 2017	13
Tabel 2.2 Akses Air Layak Semua Jenjang Berdasarkan Provinsi Tahun 2017	16
Tabel 2.3 Jamban Layak dan Terpisah dengan Kondisi Baik serta Rusak Ringan	19
Tabel 2.4 Kondisi Akses Sarana Cuci Tangan pada semua Jenjang Berdasarkan Provinsi 2017	22
Tabel 2.5 Analisis Kondisi Tata Kelola Sanitasi Sekolah	25
Tabel 2.6 Kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah di Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar	37
Tabel 2.7 Kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah di Direktorat Pembinaan SMP	38
Tabel 2.8 Kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah di Direktorat Pembinaan SMA	39
Tabel 2.9 Kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah di Direktorat Pembinaan SMK	40
Tabel 2.10 Kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah di Direktorat Pembinaan PKLK ...	41
Tabel 3.1 <i>Milestone</i> Sanitasi Sekolah 2017-2030	62
Tabel 3.2 Perhitungan investasi Sanitasi Sekolah untuk semua jenjang	63
Tabel 5.1 Strategi Pengembangan Sanitasi Sekolah	85
Tabel 5.2 Kegiatan dan Target Jangka Pendek Sanitasi Sekolah dalam Kerangka UKS	88
Tabel 5.3 Rencana Kegiatan Pengembangan Sanitasi Sekolah di Direktorat Pembinaan SD	90
Tabel 5.4 Rencana Kegiatan Pengembangan Sanitasi Sekolah di Direktorat PSMP	91
Tabel 5.5 Rencana Kegiatan Pengembangan Sanitasi Sekolah di Direktorat PSMK	93
Tabel 5.6 Rencana Kegiatan Pengembangan Sanitasi Sekolah di Direktorat PSMA	94
Tabel 5.7 Rencana Kegiatan Pengembangan Sanitasi Sekolah di Direktorat PKLK	96

Daftar Grafik



Grafik 2.1 Ketersediaan Air di Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2016/2017	10
Grafik 2.3 Ketersediaan Jamban di Setiap Jenjang Pendidikan	12
Grafik 2.4 Ketersediaan Sarana Cuci Tangan di Setiap Jenjang Pendidikan	14

Daftar Singkatan

ABC | Abc

AMPL	Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
AVRDC	<i>Asian Vegetable Research and Development Center</i>
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
CSR	<i>Corporate Social Responsibility</i>
CTPS	Cuci Tangan Pakai Sabun
Dapodik	Data Pokok Pendidikan
Dikdasmen	Pendidikan Dasar dan Menengah
Dirjen	Direktorat Jenderal
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	Daerah Khusus Ibukota
EMIS	<i>Education Management Information System</i>
ILE	<i>Internatoinal Learning Exchange</i>
Juknis	Petunjuk Teknis
Kemdikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KemenPUPERA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MKM	Manajemen Kebersihan Menstruasi
MTs	Madrasah Tsanawiyah
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur
P2KP	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
PAMSIMAS	Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PDSPK	Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
PHAST	<i>Participatory Hygiene and Sanitation Transformation</i>
PHBS	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKLK	Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
SLB	Pendidikan Luar Biasa
PPSP	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
PSD	Pembinaan Sekolah Dasar

PSMA	Pembinaan Sekolah Menengah Atas
PSMK	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
PSMP	Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
RABS	Rencana Anggaran Belanja Sekolah
RKS	Rencana Kerja Sekolah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDBS	Sekolah Dasar Bersih dan Sehat
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
Setditjen	Sekretariat Direktorat Jenderal
SLB	Sekolah Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SSK	Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten
SSS	Strategi Sanitasi Sekolah
SWOT	<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i>
Takola	Tata Kelola Sekolah
TFM	Tim Fasilitator Masyarakat
ToT	<i>Training of Trainer</i>
TP UKS/M	Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah
UKS/M	Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
UU	Undang-undang
WASH	<i>Water, Sanitation, and Hygiene</i>
WHO	<i>World Health Program</i>
WinS	<i>WASH in Schools</i>

Pendahuluan

1.1 Definisi Sanitasi Sekolah

Perhatian pada kesehatan lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya Sanitasi Sekolah merupakan amanat undang-undang, khususnya UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 79 menegaskan bahwa “Kesehatan Sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup peserta didik dalam lingkungan sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.”

Bagaimana menjalankan program Sanitasi Sekolah yang baik? Sebuah sekolah dapat dikatakan menerapkan Sanitasi Sekolah yang baik apabila sekolah tersebut dapat memenuhi tiga aspek yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yakni:

- 1) Sekolah memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, terutama akses pada sarana air bersih yang aman dari pencemaran, sarana sanitasi (jamban) yang berfungsi dan terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan, serta fasilitas cuci tangan pakai sabun.
- 2) Sekolah melaksanakan kegiatan pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) secara rutin dan memastikan pelaksanaan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) secara konsisten.

- 3) Adanya dukungan manajemen sekolah untuk mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan sarana sanitasi dan biaya kegiatan PHBS.

1.2 Pentingnya Sanitasi Sekolah

Mengapa program Sanitasi Sekolah merupakan hal yang penting? Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di tingkat global, ketersediaan sanitasi sekolah yang memadai akan memberikan dampak yang luar biasa pada beberapa indikator utama dalam pembangunan sektor kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, ekonomi, serta air dan sanitasi. Pada sektor kesehatan, kegiatan sederhana, seperti cuci tangan dengan sabun dapat menurunkan risiko terkena penyakit diare hingga 47%¹.

Peserta didik yang sehat dapat terhindar penyakit diare sehingga meningkatkan akses kepada pendidikan. Pembiasaan CTPS secara rutin dapat menurunkan angka ketidakhadiran secara signifikan hingga 50%². Selain itu penyediaan air minum yang aman di sekolah dapat meningkatkan konsentrasi siswa dalam menangkap pelajaran dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas akademik mereka³.

Sanitasi Sekolah juga mendorong kesetaraan gender. Studi UNESCO menemukan bahwa secara global, 1 dari 5 anak perempuan yang berusia di atas sekolah dasar tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah, salah satunya akibat fasilitas sanitasi yang tidak layak di sekolah⁴. Hal yang sama pula, 1 dari 6 siswa perempuan yang sedang menstruasi terpaksa tidak sekolah

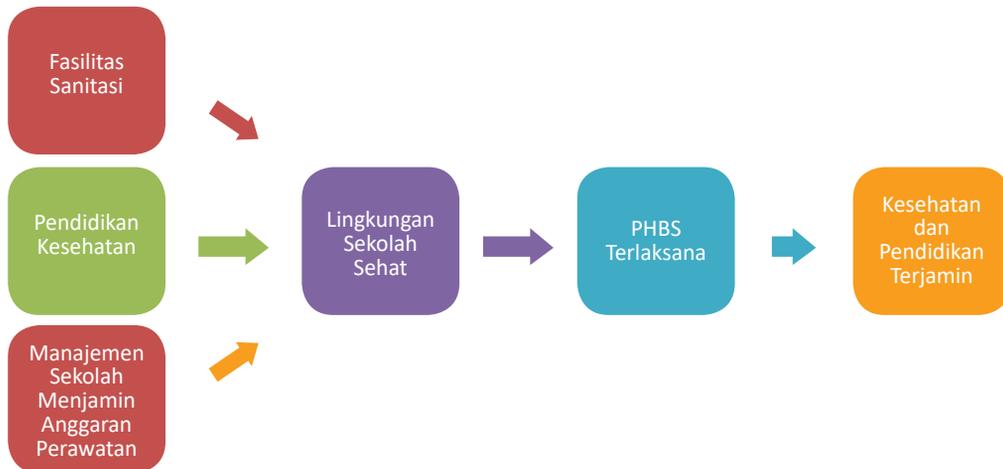
¹ Freeman et al (2014) Systematic Review: Hygiene and health: systematic review of handwashing practices worldwide and update of health effects, *Tropical Medicine and International Health*, Vol 19 No. 8 p906-916

² O'Reilly et. Al. The impact of a school-based safe water and hygiene programme on knowledge and practices of students and their parents: Nyanza Province, western Kenya, 2006', *Epidemiology and Infection*, 136(1), pp. 80–91

³ Edmonds, Caroline J., and Denise Burford, 'Should Children Drink More Water? The effects of drinking water on cognition in children', *Appetite*, vol. 52, no. 3, June 2009, pp. 776–779;

⁴ UNESCO, Institute of Statistics (2010), *Out-of-School Adolescents*, Montreal, Canada; UNESCO Institute for Statistic

(membolos) karena sarana sanitasi di sekolah yang tidak layak⁵. Terakhir, anak usia sekolah dasar dapat menjadi agen perubahan hidup bersih dan sehat di keluarga dan lingkungannya.



Gambar 1.1 Alur Sanitasi Sekolah

1.3 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pada tingkat global, sanitasi sekolah juga merupakan salah satu prioritas pembangunan yang termasuk ke dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) Tujuan 4a. Tujuan 4a adalah “Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat, dan gender, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua”. Lebih rinci lagi pada tujuan 4a1 dinyatakan “Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik, (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan

⁵ Burnet Institute: Menstrual Hygiene Management in Indonesia “Understanding practices, determinants and impacts among adolescent school girls” Final Report, 2015

pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa difabel, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan”. Sejalan dengan tujuan SDGs, maka sanitasi sekolah terdiri dari akses air, sanitasi, dan fasilitas cuci tangan.

Seperti digambarkan pada diagram di bawah ini, indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat digabungkan dengan indikator yang ada di tingkat nasional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan No.24/2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SMP/ MTs, SMA/MA dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMSLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) tertulis secara jelas mengenai rasio minimal jamban untuk siswa dan siswi pada setiap jenjang sekolah.



Gambar 1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

1.4 Sanitasi Sekolah Dalam RPJMN Tahun 2015-2019

Dalam kurun waktu 2015-2019, Pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya dalam pembangunan sanitasi dengan mencanangkan beberapa target penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Bidang Permukiman dan Perumahan. Pada dokumen Buku 1 RPJMN tentang Agenda Pembangunan Nasional, halaman 6-102 disebutkan salah satu strategi dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi adalah sinergi dan koordinasi sebagaimana berikut:

*Sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk sinergi dengan pelaksanaan **sanitasi sekolah dan pesantren**, kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, serta pembangunan kawasan tertinggal, perbatasan, dan kawasan khusus.*

Dengan demikian, jelas bahwa pengembangan Sanitasi Sekolah merupakan bagian dari agenda nasional untuk pembangunan kawasan permukiman. Hal ini juga dipertegas dengan tercantumnya target persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

1.5 Indikator Sanitasi Sekolah

Dokumen *Core questions and indicators for monitoring WASH in Schools in the Sustainable Development Goals* yang diterbitkan oleh UNICEF dan WHO Tahun 2016, mendefinisikan akses pada Sanitasi Sekolah ke dalam tiga empat tingkatan, yaitu, tidak tersedia akses, pelayanan terbatas, pelayanan dasar,

dan pelayanan tingkat lanjut. Jenis akses itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu akses pada sumber air minum layak dan tersedia sepanjang waktu, akses pada fasilitas sanitasi dasar yang layak dan terpisah, dan akses pada fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

 Air	 Sanitasi	 Kebersihan
Pelayanan Tingkat Lanjut <i>Ditentukan tingkat Nasional</i>	Pelayanan Tingkat Lanjut <i>Ditentukan tingkat Nasional</i>	Pelayanan Tingkat Lanjut <i>Ditentukan tingkat Nasional</i>
Pelayanan Dasar Air minum dari sumber yang layak dan tersedia di sekolah	Pelayanan Dasar Fasilitas yang layak, terpisah berdasarkan jenis kelamin dan dapat digunakan di sekolah	Pelayanan Dasar Sarana CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) lengkap dengan air yang mengalir dan sabun
Pelayanan Terbatas Ada sumber air layak (air perpipaan, sumur/mata air terlindungi, penampungan air hujan, air dalam kemasan), namun air tidak tersedia saat survei	Pelayanan Terbatas Ada sarana sanitasi yang layak (WC sentor cubluk dengan tutup, jamban komposting), namun tidak terpisah berdasarkan jenis kelamin dan tidak dapat dipergunakan	Pelayanan Terbatas Sarana cuci tangan dengan air namun tidak tersedia sabun
Tidak Tersedia Tidak ada sumber air atau sumber air tidak layak (sumur/mata air tidak terlindungi, air tangka dan sumber air permukaan)	Tidak Tersedia Tidak ada jamban atau jamban tidak layak (cubluk tanpa penutup, jamban menggantung dan buang air di sembarang tempat)	Tidak Tersedia Tidak ada sarana cuci tangan di sekolah, atau ada sarana cuci tangan tapi tidak tersedia air

Gambar 1.3 Operasional Indikator Sanitasi Sekolah dalam SDGs

1.6 Standar Nasional Sanitasi Sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan No.24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana SD/MI, SMP/ MTs, SMA/MA, standar terkait Sanitasi Sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Standar Sanitasi Nasional Sekolah dan Madrasah

Komponen	Standar
Air	<ul style="list-style-type: none"> • Air harus tersedia • Tempat air dalam jamban, volume minimum 200 liter dan berisi air bersih
Sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jamban untuk buang air besar dan buang air kecil • Rasio jamban sekolah Sekolah Dasar: Laki-laki 1:60, Perempuan 1:50 Sekolah Menengah Pertama: Laki-laki 1:40, Perempuan 1:30 Sekolah Menengah Atas: Laki-laki 1:40, Perempuan 1:30 • Luas minimum per unit jamban adalah 2 m² • Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan • Tersedia air bersih di setiap unit jamban • Jamban kloset jongkok dengan leher angsa • Gayung • Gantungan pakaian • Tempat sampah
Cuci Tangan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit fasilitas cuci tangan untuk setiap ruang kelas • 1 unit fasilitas cuci tangan untuk ruang guru • 1 unit fasilitas cuci tangan untuk Ruang UKS

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan No. 24 Tahun 2007

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMSLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), standar terkait Sanitasi Sekolah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Standar Sanitasi Nasional Sekolah Luar Biasa

Komponen	Standar
Air	<ul style="list-style-type: none"> • Air harus tersedia • Tempat air dalam jamban, volume minimum 200 liter dan berisi air bersih
Sanitasi dan Perlengkapan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Jamban untuk buang air besar dan buang air kecil • Jumlah minimum jamban 2 unit pada SDLB, SMSLB, dan/atau SMALB • Minimum salah satu unit jamban dapat digunakan oleh anak berkebutuhan khusus, termasuk siswa berkursi roda • Dilengkapi dengan peralatan yang mempermudah peserta didik berkebutuhan khusus untuk menggunakan jamban • Luas minimum per unit jamban adalah 2 m² • Jamban harus ber dinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan • Tersedia air bersih di setiap unit jamban • Jamban kloset jongkok dengan leher angsa dan jamban kloset duduk untuk pengguna kursi roda • Gayung 1 buah/unit jamban • Gantungan Pakaian 1 buah/ruang • Tempat Sampah 1buah/ruang
Cuci Tangan	<ul style="list-style-type: none"> • 1 unit fasilitas cuci tangan untuk setiap ruang kelas • 1 unit fasilitas cuci tangan untuk ruang guru • 1 unit fasilitas cuci tangan untuk Ruang UKS

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan No. 33 Tahun 2008

Jika berdasarkan RPJMN 2015-2020, maka target pemenuhan Sanitasi Sekolah adalah bagian dari pemenuhan target sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP. Sayangnya tidak semua jenjang pendidikan memiliki target pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan SNP. Adapun target RPJMN 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Target RPJMN Sekolah dengan sarana dan prasarana sesuai SNP

Jenjang	Target RPJMN Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP					Keterangan
	2015	2016	2017	2018	2019	
SD	15	17	24	32	40	Ada target
SMP	22	29	37	45	53	
SLB/SDLB/ SMSLB/SMALB	-	-	-	-	-	Tidak ada target
SMA	-	-	-	-	-	
SMK	-	-	-	-	-	

Sumber: RPJMN 2015-2020

1.7 Ruang Lingkup Penyusunan Peta Jalan Sanitasi Sekolah

1.7.1 Pengertian *Peta Jalan*

Secara harfiah, *Peta Jalan* dapat diartikan sebagai peta penentu, penunjuk arah, atau peta jalan menuju target sasaran. Sementara secara definitif *Peta Jalan* merupakan sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Dalam pelaksanaan UKS yang di dalamnya terdapat kegiatan Sanitasi Sekolah, *Peta Jalan* menjadi acuan untuk mengukur pencapaian kinerja serta evaluasi terhadap target sasaran.

Secara umum, informasi minimal yang dijelaskan dalam *Peta Jalan* adalah tahapan atau aktivitas yang harus dilakukan seperti: gambaran kondisi yang terjadi saat ini, target capaian, strategi dan kegiatan yang harus dilakukan, pelaksana dan penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, anggaran yang diperlukan, serta mekanisme *monitoring* dan evaluasi.

1.7.2 Tujuan

- 1) Sebagai dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah guna mewujudkan Sanitasi Sekolah yang berkualitas di akhir tahun 2030;
- 2) Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan komitmen & keterlibatannya dalam bentuk penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Sekolah
- 3) Menyepakati konsep Sanitasi Sekolah di semua kementerian dan lembaga terkait, yakni terdiri dari pembangunan sarana, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, dan memastikan manajemen sekolah memiliki alokasi anggaran untuk sanitasi sekolah.

1.7.3 Landasan Hukum

Penyusunan *Peta Jalan* Sanitasi Sekolah dalam kerangka UKS disusun atas dasar undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang mengatur pelaksanaan sanitasi sekolah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA;
 - 7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMSLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
 - 8) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 6/x/pb/2014 Nomor: 73 tahun 2014 Nomor: 41 tahun 2014 Nomor: 81 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 - 9) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah;
 - 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;

- 11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.



Sumber foto: UNICEF/2017

Analisis Situasi dan Kondisi Sanitasi Sekolah di Indonesia

2.1 Gambaran Kondisi Sanitasi Sekolah Tahun 2017

Dengan mengikuti indikator Sanitasi Sekolah dalam SDGs, gambaran kondisi Sanitasi Sekolah di Indonesia dibagi dalam 3 aspek, yaitu akses pada sumber air, akses pada fasilitas sanitasi atau jamban, dan akses pada fasilitas cuci tangan.

Tabel 2.1 Kondisi Sanitasi Sekolah Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	Sarana Air Layak dan Cukup	Jamban layak, dan terpisah	Sarana Cuci Tangan
SD	64,76%	31,40%	65,1%
SMP	65,03%	41,88%	60,19%
SMA	70,40%	35,82%	68,72%
SMK	74,65%	41,36%	68,86%
PKLK	76,47%	29,95%	77,83%
Rata-rata	70,26%	36,08%	68,14%

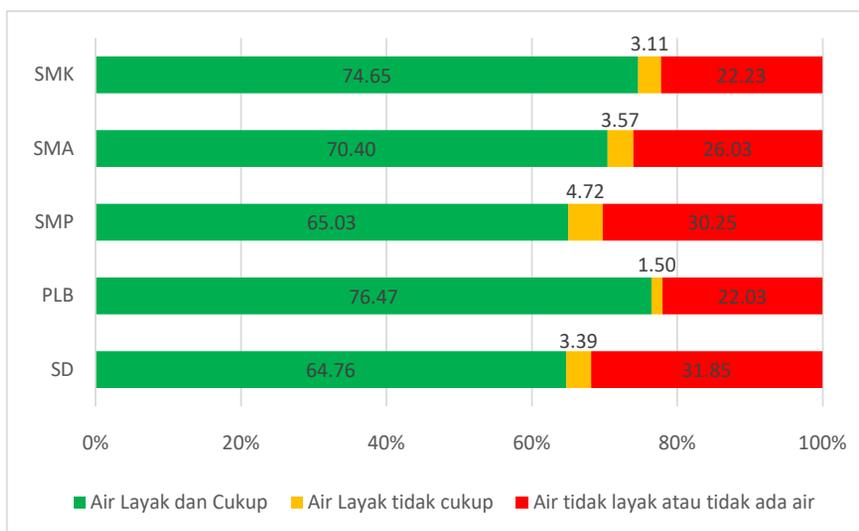
Sumber: Hasil analisis PDSPK Kemendikbud, Tahun 2016

2.1.1 Akses Air

Secara nasional, rerata sekolah yang memiliki air layak dan cukup sejumlah sekitar 70,25%. Berdasarkan Grafik 2.1 diketahui 64,76% sekolah dasar di Indonesia sudah memiliki sumber air layak dan cukup. Sumber air di sekolah yang termasuk kategori layak yakni PAM/ perpipaan, pompa, air hujan, mata air terlindungi, sumur terlindungi, dan air kemasan. Sumber air tidak layak misalnya sumur tidak terlindungi, mata air tidak terlindungi, sungai, embung, danau, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan kecukupan air adalah air tersebut tersedia sepanjang waktu di sekolah, baik itu di musim penghujan maupun di musim kemarau.

Selain itu, SD dan SMP menjadi jenjang sekolah yang paling banyak tidak memiliki akses air atau air tidak layak (di atas 30%). Dampak dari tidak adanya akses air di sekolah adalah jamban yang tidak berfungsi, tidak bisa melakukan cuci tangan pakai sabun, sehingga anak-anak rentan terkena diare. Oleh karenanya, perlu ada perhatian khusus oleh para pemangku kebijakan kepada jenjang SD dan SMP agar dapat memastikan akses air ke sekolahnya. Sebaiknya perencanaan program sanitasi sekolah diarahkan kepada jenjang SD dan SMP, demikian pula dengan alokasi anggarannya.

Grafik 2.1 Ketersediaan Air di Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2016/2017



Sumber: Hasil analisis PDSPK Kemendikbud, Tahun 2016

Berdasarkan jenjang dan provinsi, maka pada jejang SD dan SMP, Provinsi DKI Jakarta memiliki akses tertinggi pada sumber air layak dan cukup dengan cakupan masing-masing 84,3% dan 84,23%. Pada jenjang SLB, Provinsi Bangka Belitung memiliki akses paling tinggi pada sumber air layak dan cukup mencapai 100%. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi dengan akses tertinggi pada sumber air layak dan cukup untuk jenjang SMA dan SMK.

Sebaliknya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki akses terendah pada sumber air layak dan cukup untuk tiga jenjang sekaligus, yaitu SD, PKLK dan SMP. Untuk itu, perlu ada perhatian khusus dari para pemangku kebijakan untuk meningkatkan akses air layak dan cukup, dengan memprioritaskan alokasi anggaran kepada Provinsi NTT. Pada Jenjang SMA dan SMK, provinsi dengan akses terendah pada

sumber air layak dan cukup adalah Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian, perhatian khusus dari Direktorat Pembinaan SMA dan Direktorat Pembinaan SMK perlu diberikan kepada Provinsi Kalimantan Utara. Detail Kondisi Akses Air Layak dan Cukup pada semua Jenjang Berdasarkan Provinsi 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Akses Air Layak Semua Jenjang Berdasarkan Provinsi Tahun 2017

No	Provinsi	Akses Air Layak dan Cukup				
		SD	SLB	SMP	SMA	SMK
1	DKI Jakarta	84.30	91.95	84.23	85.12	83.08
2	Jawa Barat	71.42	82.29	75.42	80.27	79.67
3	Banten	75.48	73.56	78.94	83.79	75.70
4	Jawa Tengah	78.99	80.46	80.11	86.23	83.90
5	DI Yogyakarta	83.39	90.79	83.10	90.68	89.04
6	Jawa Timur	73.32	79.18	75.04	78.20	78.20
7	Aceh	61.72	69.49	57.73	58.97	61.62
8	Sumatera Utara	56.61	72.92	64.75	70.74	72.45
9	Sumatera Barat	61.73	70.37	58.56	70.10	69.85
10	R i a u	65.91	78.05	64.80	70.48	78.75
11	Kepulauan Riau	56.08	61.54	53.17	58.47	45.56
12	J a m b i	59.13	56.25	63.92	67.87	73.21
13	Sumatera Selatan	64.06	73.33	64.45	67.92	70.92
14	Bangka Belitung	78.80	100.00	78.54	81.82	81.48
15	Bengkulu	67.82	73.33	67.47	78.36	77.78
16	Lampung	73.32	81.82	73.82	82.13	85.68
17	Kalimantan Barat	38.28	57.89	44.32	51.87	59.36
18	Kalimantan Tengah	45.97	77.27	48.74	59.91	56.59
19	Kalimantan Selatan	57.88	66.67	53.74	67.93	67.77

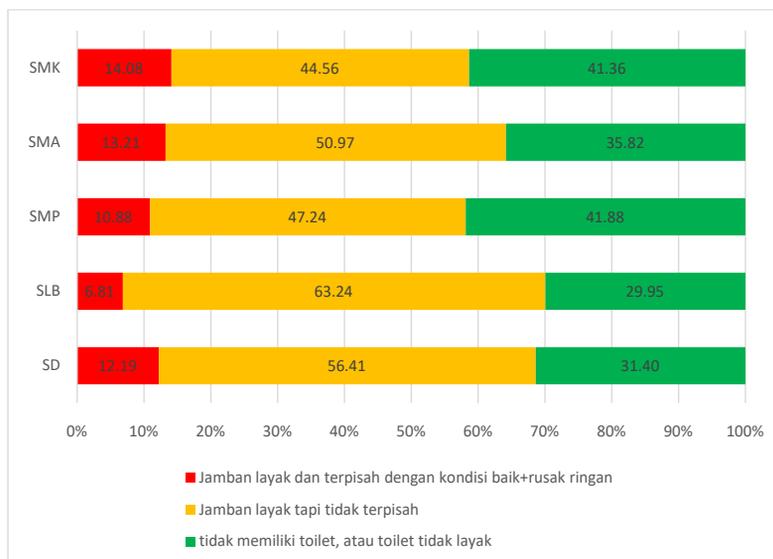
20	Kalimantan Timur	40.37	48.28	43.56	46.01	52.34
21	Kalimantan Utara	30.43	50.00	31.68	28.07	28.57
22	Sulawesi Utara	69.76	65.22	67.47	68.98	71.91
23	Gorontalo	67.99	50.00	62.04	78.95	72.73
24	Sulawesi Tengah	56.36	81.82	57.02	62.56	66.47
25	Sulawesi Selatan	66.21	81.01	68.09	76.50	75.70
26	Sulawesi Barat	47.29	72.73	50.00	73.75	60.33
27	Sulawesi Tenggara	46.78	61.82	46.99	53.87	51.39
28	Maluku	50.61	53.85	45.58	50.76	49.52
29	Maluku Utara	52.29	68.75	47.40	48.02	47.75
30	B a l i	56.27	75.00	65.92	64.15	65.34
31	Nusa Tenggara Barat	68.03	63.89	60.33	70.68	70.69
32	Nusa Tenggara Timur	29.43	47.06	28.65	35.98	34.23
33	Papua	32.07	66.67	35.91	42.79	59.20
34	Papua Barat	39.23	80.00	38.21	50.86	58.82
	Indonesia	64.76	76.47	65.03	70.40	74.65

Sumber: Hasil analisis PDSPK Kemendikbud, Tahun 2016

2.1.2 Akses Jamban

Hanya sekitar 11,43% sekolah dari semua jenjang di Indonesia yang telah memiliki jamban yang terpisah dan berfungsi dengan baik. Sedangkan rata-rata 52,49% sekolah pada semua jenjang memiliki toilet yang tidak layak, tidak terpisah, atau tidak berfungsi. Ini artinya, secara nasional separuh siswa sekolah memiliki akses terbatas terhadap jamban selama waktu belajar di sekolah. Bahkan, masih terdapat 36,08% sekolah yang tidak memiliki akses sama sekali. Padahal buruknya fasilitas sanitasi di sekolah dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, seperti hilangnya waktu belajar dan menurunnya produktivitas siswa karena absen dari sekolah.

Grafik 2.2 Ketersediaan Jamban di Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2016/2017



Sumber: Hasil analisis PDSPK Kemendikbud, Tahun 2016

Berdasarkan jenjang dan provinsi, ketersediaan jamban yang layak dan terpisah sangat memprihatinkan. Secara umum, tidak ada satu provinsi pun yang mencapai angka 70% pada akses dasar pada jamban yang layak dan terpisah. Provinsi DIY adalah provinsi dengan akses tertinggi, yaitu sebesar 68,52% pada jenjang SMP. Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara merupakan provinsi dengan akses terendah pada jamban yang layak. Sehingga, fokus perhatian harus diberikan oleh para pemangku kebijakan kepada Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Tabel 2.3 Jamban Layak dan Terpisah dengan Kondisi Baik serta Rusak Ringan

No.	Provinsi	Ketersediaan Jamban Layak, Terpisah, Kondisi Baik, dan Rusak Ringan				
		SD	SLB	SMP	SMA	SMK
1	DKI Jakarta	51.19	42.53	55.27	42.35	47.18
2	Jawa Barat	31.46	27.79	44.57	34.15	40.04
3	Banten	33.76	29.89	44.90	40.12	44.39
4	Jawa Tengah	41.54	31.03	54.73	40.61	48.55
5	DI Yogyakarta	65.36	53.95	68.52	43.48	50.23
6	Jawa Timur	30.93	22.88	42.99	34.52	37.66
7	Aceh	23.47	27.12	29.70	30.37	38.38
8	Sumatera Utara	29.08	45.83	42.55	33.88	43.85
9	Sumatera Barat	33.66	20.00	42.34	37.62	45.23
10	R i a u	38.00	36.59	46.06	38.57	45.42
11	Kepulauan Riau	50.33	53.85	58.01	45.76	38.89
12	J a m b i	24.77	43.75	35.93	42.53	47.62
13	Sumatera Selatan	34.93	46.67	40.33	39.97	48.23
14	Bangka Belitung	63.34	55.56	68.29	66.67	66.67
15	Bengkulu	26.69	46.67	37.35	41.79	45.56
16	Lampung	28.57	50.00	36.76	37.66	43.88
17	Kalimantan Barat	32.86	57.89	46.08	42.14	50.27
18	Kalimantan Tengah	22.41	50.00	38.69	34.05	38.76
19	Kalimantan Selatan	30.54	28.21	44.73	46.20	52.07
20	Kalimantan Timur	42.06	44.83	52.48	35.68	48.60
21	Kalimantan Utara	29.13	50.00	41.61	45.61	50.00
22	Sulawesi Utara	25.51	26.09	31.25	36.57	39.33
23	Gorontalo	29.86	37.50	44.75	54.39	50.91
24	Sulawesi Tengah	16.45	40.91	31.65	33.00	30.06
25	Sulawesi Selatan	27.05	16.46	41.62	37.10	36.21
26	Sulawesi Barat	10.53	13.64	27.51	32.50	23.97
27	Sulawesi Tenggara	17.28	16.36	29.18	20.07	26.39

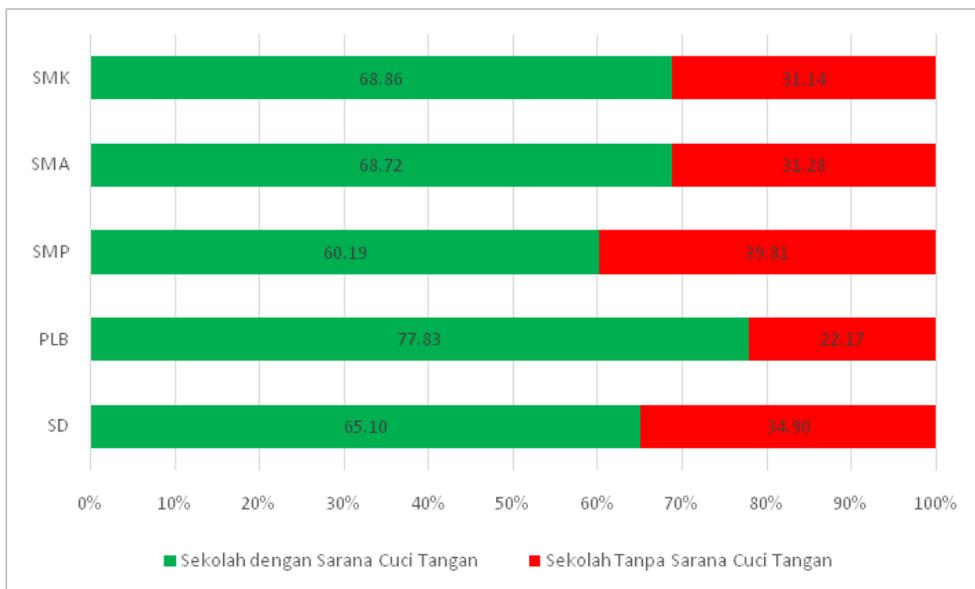
28	Maluku	13.57	15.38	20.37	19.08	22.86
29	Maluku Utara	9.72	31.25	18.28	20.34	17.12
30	B a l i	43.04	62.50	55.97	42.77	43.75
31	Nusa Tenggara Barat	24.94	25.00	31.86	29.97	26.21
32	Nusa Tenggara Timur	19.03	32.35	28.40	28.05	27.69
33	Papua	11.45	8.33	25.00	29.30	36.00
34	Papua Barat	17.29	0.00	28.57	35.34	33.33
	Indonesia	31.40	29.95	41.88	35.82	41.36

Sumber: Hasil analisis PDSPK Kemendikbud, Tahun 2016

2.1.3 Akses Sarana Cuci Tangan

SLB menjadi jenjang pendidikan yang memiliki sarana cuci tangan paling banyak di seluruh Indonesia. Hampir 78 persen SLB sudah memiliki akses sarana cuci tangan. SMA dan SMK memiliki persentase sarana cuci tangan cukup banyak di antara jenjang pendidikan lainnya. Sementara SMP adalah jenjang sekolah yang memiliki sarana cuci tangan yang paling sedikit, hanya sekitar 60 persen.

Grafik 2.3 Ketersediaan Sarana Cuci Tangan di Setiap Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2016/2017



Sumber: Hasil analisis PDSPK Kemendikbud, Tahun 2016

Berdasarkan jenjang dan provinsi, rata-rata ketersediaan sarana cuci tangan di atas 60%. Provinsi yang paling tinggi aksesnya pada sarana cuci tangan adalah Provinsi DKI Jakarta untuk jenjang SMP dan SMA, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jenjang SD dan SMK, dan Kalimantan Utara untuk jenjang SLB. Provinsi Papua adalah provinsi dengan ketersediaan sarana cuci tangan terendah pada tiga jenjang pendidikan, yaitu SD, SLB, dan SMP. Untuk jenjang SMA, Provinsi Kalimantan Utara dan jenjang SMK Provinsi Aceh, keduanya merupakan provinsi terendah untuk akses pada sarana cuci tangan.

Tabel 2.4 Kondisi Akses Sarana Cuci Tangan pada semua Jenjang Berdasarkan Provinsi 2017

No.	Provinsi	Ketersediaan Sarana Cuci Tangan				
		SD	SLB	SMP	SMA	SMK
1	DKI Jakarta	89.53	94.25	84.78	94.76	85.64
2	Jawa Barat	57.72	78.47	64.51	74.22	71.98
3	Banten	63.73	79.31	65.44	79.84	72.90
4	Jawa Tengah	84.94	82.76	73.64	82.96	78.15
5	DI Yogyakarta	93.54	96.05	81.48	88.20	86.76
6	Jawa Timur	73.99	85.35	66.94	77.46	70.59
7	Aceh	45.68	38.98	41.43	50.69	45.96
8	Sumatera Utara	40.36	64.58	41.29	55.53	53.94
9	Sumatera Barat	52.16	61.48	44.27	58.20	50.25
10	R i a u	61.83	63.41	52.31	64.29	60.07
11	Kepulauan Riau	83.30	84.62	73.41	78.81	72.22
12	J a m b i	59.21	62.50	54.59	68.33	64.88
13	Sumatera Selatan	61.32	66.67	54.58	65.52	68.09
14	Bangka Belitung	83.17	77.78	72.20	75.76	79.63
15	Bengkulu	53.08	60.00	49.88	64.93	55.56
16	Lampung	70.85	86.36	65.60	74.04	71.82
17	Kalimantan Barat	49.80	84.21	54.00	61.60	58.82
18	Kalimantan Tengah	54.41	86.36	52.64	56.90	58.14
19	Kalimantan Selatan	77.84	87.18	76.19	82.07	79.34
20	Kalimantan Timur	71.06	82.76	66.01	72.30	72.90
21	Kalimantan Utara	47.83	100.00	55.28	47.37	64.29
22	Sulawesi Utara	60.43	91.30	58.10	70.37	65.73
23	Gorontalo	78.20	75.00	60.19	68.42	60.00
24	Sulawesi Tengah	50.99	90.91	47.04	53.69	52.02
25	Sulawesi Selatan	69.24	72.15	62.15	64.84	67.06
26	Sulawesi Barat	53.17	54.55	52.66	62.50	49.59

27	Sulawesi Tenggara	44.47	63.64	47.67	48.24	52.78
28	Maluku	68.99	69.23	59.77	60.69	60.95
29	Maluku Utara	65.78	87.50	56.21	57.63	49.55
30	B a l i	86.49	93.75	80.35	87.42	86.36
31	Nusa Tenggara Barat	68.95	61.11	61.73	78.18	67.24
32	Nusa Tenggara Timur	65.81	79.41	50.66	50.00	53.08
33	Papua	31.35	33.33	35.23	48.37	54.40
34	Papua Barat	41.10	80.00	42.86	53.45	52.94
	Indonesia	65.10	77.83	60.19	68.72	68.86

Sumber: Hasil analisis PDSPK Kemendikbud, Tahun 2016



Sumber foto: UNICEF/2017

2.2 Analisis Situasi Tata Kelola Sanitasi Sekolah Tahun 2017

Pada tanggal 14-18 November 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi tuan rumah Pertukaran Pembelajaran Sanitasi Sekolah atau *Water, Sanitation, and Hygiene in Schools International Learning Exchange* (WinS ILE). Dalam forum internasional tersebut, 17 negara di Asia dan Pasifik (Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, Democratic People's Republic of Korea, Fiji, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, People's Republic of China, Philippines, Solomon Islands, Sri Lanka, dan Vanuatu) berbagi pengalaman pembangunan Sanitasi Sekolah, termasuk pemetaan analisis kondisi tata kelola Sanitasi Sekolah. Ada 5 komponen yang dianalisis, yaitu kebijakan dan perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, *monitoring* dan evaluasi, pengelolaan pelaksanaan, dan pengembangan kapasitas.



Di bawah ini adalah detail analisis yang telah dibahas oleh peserta yang mewakili berbagai kementerian di tingkat nasional, perwakilan dari beberapa pemerintah daerah, perwakilan lembaga non-pemerintah dan juga pihak swasta.

Tabel 2.5 Analisis Kondisi Tata Kelola Sanitasi Sekolah

Analisis Kondisi yang Memampukan untuk Sanitasi Sekolah – Tingkat Nasional (<i>Analysis of WASH in Schools Enabling Environment – National Level</i>)					
Kondisi yang Memampukan dan Indikator untuk Sanitasi Sekolah	Hijau	Kuning	Merah	Peringkat (Warna)	Catatan
Kebijakan & Perencanaan	<p>Kebijakan nasional Sanitasi Sekolah secara komprehensif meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman dan arahan strategis • Standar minimum • Struktur dan koordinasi antar lembaga • Kerangka implementasi • Mekanisme pembiayaan 	<p>Kebijakan nasional Sanitasi Sekolah terbatas pada pernyataan tentang arah dan mandat. Sedikit atau hampir tidak ada rincian tentang standar, struktur dan koordinasi kelembagaan, kerangka implementasi, dan/atau mekanisme pembiayaan.</p>	<p>Sanitasi Sekolah tidak termasuk kebijakan atau pedoman nasional.</p>	Kuning	<p>Kebijakan nasional tentang standar Sanitasi Sekolah, koordinasi kelembagaan ada tetapi tidak sepenuhnya dilaksanakannya; ada potensi untuk penyediaan panduan yang lebih jelas untuk sekolah</p>
	<p>Apakah ada kebijakan nasional untuk Sanitasi Sekolah?</p>	<p>Ya, itu juga tercermin dalam rencana jangka menengah/panjang pemerintah dan dimasukkan dalam rencana tahunan untuk mencapai <i>milestone</i>.</p>	<p>Ya, tetapi tidak secara konsisten tercermin dalam rencana tahunan, sehingga sulit untuk menentukan bagaimana target akan dicapai.</p>	Merah	<p>Tidak ada target nasional yang ditetapkan untuk Sanitasi Sekolah.</p>
<p>Apakah ada sasaran nasional yang jelas untuk Sanitasi Sekolah?</p>			<p>Tidak ada target nasional yang ditetapkan untuk Sanitasi Sekolah.</p>		

Kebijakan & Perencanaan	<p>Apakah ada peran dan tanggung jawab yang jelas untuk Sanitasi Sekolah?</p>	<p>Ya, ada lembaga utama yang memiliki akuntabilitas yang jelas, peran yang jelas dan tanggung jawab untuk setiap tingkat (nasional, regional, kabupaten dan lokal), dan mekanisme koordinasi.</p>	<p>Ya, tetapi tanggung jawab dan tindakan tidak jelas dan/atau tidak ada mekanisme koordinasi. Mungkin ada beberapa orang yang ditunjuk untuk “memimpin” lembaga-lembaga, yang melemahkan akuntabilitas dan kepemilikan Sanitasi Sekolah.</p>	<p>Tidak ada tanggung jawab yang jelas untuk Sanitasi Sekolah.</p>	<p>Kuning</p>	<p>Sanitasi Sekolah dimasukkan sebagai bagian dari sasaran infrastruktur pendidikan nasional.</p> <p>Ada program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan peraturan bersama 4 menteri. Meskipun ada pembagian tanggung jawab pada masing-masing kementerian, dalam praktiknya beberapa kegiatan tumpang tindih antar kementerian dan hampir tidak ada mekanisme koordinasi. Kementerian lain yang juga memiliki unsur-unsur program yang terkait dengan Sanitasi Sekolah, adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
------------------------------------	---	--	---	--	---------------	--

Kebijakan & Perencanaan	Apakah gender dibahas dalam kebijakan Sanitasi Sekolah nasional?	Kesesetaraan gender, termasuk MKM dan toilet terpisah gender, dibahas dalam kebijakan Sanitasi Sekolah, pedoman dan/atau <i>monitoring</i> , dan pemrograman.	Kesesetaraan gender dinyatakan secara umum dalam kebijakan Sanitasi Sekolah, tetapi tidak tercermin dalam pedoman dan/atau <i>monitoring</i> , dan pemrograman.	Kesesetaraan gender tidak dibahas dalam Kebijakan Sanitasi Sekolah nasional.	Kuning	Kesesetaraan gender dinyatakan secara umum pada kebijakan nasional tetapi tidak dipantau dan dilaksanakan seperti seharusnya.
Pendanaan & Pembayaan	Apakah ada anggaran sektor publik untuk Sanitasi Sekolah?	Aksesibilitas layanan Sanitasi Sekolah untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus dibahas dalam kebijakan Sanitasi Sekolah, pedoman dan/atau <i>monitoring</i> , dan pemrograman.	Aksesibilitas dinyatakan dalam kebijakan Sanitasi Sekolah secara umum, tetapi tidak tercermin dalam pedoman dan/atau <i>monitoring</i> , dan pemrograman.	Aksesibilitas tidak dibahas dalam Kebijakan Sanitasi Sekolah nasional.	Merah	Aksesibilitas dinyatakan secara umum dalam kebijakan nasional tetapi tidak ada standar tertentu atau pedoman layanan Sanitasi Sekolah untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.
	Apakah ada anggaran sektor publik untuk Sanitasi Sekolah?	Ada anggaran sektor publik di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten yang khusus dialokasikan untuk Sanitasi Sekolah.	Ada anggaran sektor publik tetapi dikelompokkan dengan pengeluaran lainnya dan/atau tidak mencakup semua aspek Sanitasi Sekolah.	Tidak ada anggaran publik untuk Sanitasi Sekolah.	Kuning	Ada anggaran sektor publik untuk sanitasi sekolah (konstruksi jamban). Namun itu hanya ada pada tingkat nasional dengan target 500 sekolah per tahun namun tanpa komponen perilaku kesehatan; anggaran subnasional yang dapat digunakan untuk Sanitasi Sekolah memang ada tetapi diperlukan pedoman yang lebih jelas untuk diberikan kepada sekolah.

Pendanaan & Pembiayaan	
Apakah ada anggaran yang memadai untuk mendukung peningkatan Sanitasi Sekolah, operasi, dan pemeliharaannya?	Ya, cukup untuk setidaknya 80% dari kebutuhan, dengan kemungkinan untuk pengembangan lebih lanjut.
Hanya cukup untuk setidaknya 50% dari kebutuhan.	Tidak ada anggaran sektor publik untuk Sanitasi Sekolah.
Kuning	Ada kesempatan untuk menggunakan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk membiayai operasional dan pemeliharaan. Namun, tidak ada panduan yang jelas tentang berapa banyak dana BOS yang dapat digunakan untuk operasional dan pemeliharaan Sanitasi Sekolah dan tingkat minimum BOS yang harus digunakan untuk memelihara Sanitasi Sekolah.
Merah	Pada saat ini, tidak ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana sekolah tertentu dipilih untuk menerima dana program sanitasi sekolah. Tidak ada mekanisme tentang bagaimana memprioritaskan sekolah karena umpan balik korektif tidak disediakan untuk sekolah.
Merah	Tidak. Pembiayaan dan pengeluaran tidak mengikuti metode apa pun untuk memprioritaskan sekolah.
Merah	Walaupun system untuk memprioritaskan sekolah ada, pengeluaran tidak mencerminkan prioritas ini.
Merah	Ya, dana diberikan kepada sekolah yang paling membutuhkan dukungan Sanitasi Sekolah. Identifikasi sekolah-sekolah ini mengikuti sistem prioritas.
Merah	Apakah sekolah yang paling membutuhkan dukungan Sanitasi Sekolah diberi prioritas yang tercermin dalam pengeluaran?

Monitoring & Evaluasi	
Apakah data Sanitasi Sekolah tercermin dalam Sistem Informasi Nasional?	Ya, dan itu termasuk indikator kualitas layanan seperti fungsi dan aksesibilitas.
Ya, tapi itu tidak mencakup kualitas layanan (misalnya, sistem hanya memonitor infrastruktur tetapi tidak apakah dapat digunakan).	Tidak.
Apakah ada sistem <i>monitoring</i> Sanitasi Sekolah nasional yang fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan, tetapi tidak mencakup semua aspek Sanitasi Sekolah dan/atau hanya memberikan gambaran terbatas tentang lingkup dan kualitas pelaksanaan?	Ada sistem <i>monitoring</i> nasional untuk Sanitasi Sekolah dalam Kementerian Pendidikan, tetapi tidak mencakup semua aspek Sanitasi Sekolah dan/atau hanya memberikan gambaran terbatas tentang lingkup dan kualitas pelaksanaan.
Ya, data Sanitasi Sekolah terdapat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2016.	Tidak ada sistem pemantauan nasional untuk Sanitasi Sekolah, tetapi unsur-unsur Sanitasi Sekolah telah dimasukkan ke dalam Dapodik. Mungkin ada upaya pemantauan terfragmentasi dari donor atau pemerintah daerah. Tidak ada <i>monitoring</i> yang sistematis tentang kualitas implementasi yang dilakukan.
Hijau	Kuning

Monitoring & Evaluasi	Apakah ada sistem untuk memberikan pengakuan pada kinerja Sanitasi Sekolah?	Ada sistem dalam Sektor Pendidikan untuk memberikan insentif, pengakuan, atau dukungan untuk unit subnasional dan/atau sekolah menurut data kinerja Sanitasi Sekolah nasional, <i>milestone</i> , dan/atau standar.	Ada sistem pengenal kinerja, tetapi hanya diimplementasikan pada skala lokal, dan/atau tidak selaras dengan kebijakan Sanitasi Sekolah nasional dan indikator M&E.	Tidak ada sistem untuk mengakui kinerja Sanitasi Sekolah.	Merah	Saat ini, tidak ada sistem untuk mengakui kinerja Sanitasi Sekolah. Ada berbagai lomba, misalnya, Lomba Sekolah Sehat dan Adiwiyata, namun Sanitasi Sekolah dianggap sebagai bagian kecil dari ini. Lomba-lomba tersebut memberikan penghargaan kepada sekolah yang lebih baik dan tidak menilai kemajuan yang diperoleh dalam 12 bulan terakhir. Sekolah yang berusaha untuk meningkatkan mungkin telah memperoleh kemajuan substansial, tetapi masih berada jauh di belakang sekolah yang baik. Sekolah tersebut layak mendapat pengakuan atas upaya mereka.
					Kuning	Kemdikbud memprakarsai pengembangan pedoman Sanitasi Sekolah pada bulan Juli 2016; pedoman ini akan digunakan oleh pelaku Sanitasi Sekolah di tingkat subnasional.

Pengaturan Implementasi					
Apakah para pelaku cukup mendapat panduan tentang bagaimana mengelola dan melaksanakan Sanitasi Sekolah di unit masing-masing?	Standar nasional Sanitasi Sekolah tersedia pada setiap tingkat dan pedoman implementasi dan bahan instruksional telah dikembangkan dan tersedia untuk para pelaku pada setiap tingkat (subnasional, sekolah, masyarakat).	Pedoman pelaksanaan nasional untuk Sanitasi Sekolah tersedia namun belum disesuaikan untuk pelaku di setiap tingkat tertentu (subnasional, sekolah, masyarakat).	Tidak ada rincian tentang bagaimana menerapkan Sanitasi Sekolah untuk para pelaku subnasional.	Kuning	Banyak materi pelatihan dan modul yang telah dihasilkan melalui program kerja sama dengan pemerintah tetapi isu kunci adalah bagaimana bahan-bahan tersebut disebarluaskan secara sistematis ke semua sekolah di Indonesia.
Apakah bahan keperluan yang penting untuk Sanitasi Sekolah tersedia?	Ada pengaturan untuk pengadaan dan distribusi perlengkapan dan layanan termasuk untuk sekolah pedesaan.	Ya, namun rantai pasokan tidak mencukupi dan/atau tidak mencapai sekolah pedesaan.	Tidak, perlengkapan dan layanan Sanitasi Sekolah sulit diperoleh oleh banyak sekolah.		Bahan habis untuk Sanitasi Sekolah (misalnya sabun) dan layanan tersedia di sebagian besar sekolah. Meskipun rantai pasokan mencapai sebagian besar daerah pedesaan, tidak ada pengaturan yang rinci untuk layanan Sanitasi Sekolah di tingkat nasional atau subnasional. Ketersediaan air yang konsisten tetap bermasalah di banyak daerah.

Pembangunan Kapasitas	
<p>Apakah Kementerian Pendidikan memiliki rencana atau strategi untuk Pengembangan Kapasitas Manusia untuk Sanitasi Sekolah?</p>	<p>Kementerian Pendidikan memiliki rencana Pengembangan Kapasitas Manusia atau strategi yang memungkinkan penyediaan keahlian teknis Sanitasi Sekolah secara sistematis (perencanaan, operasional dan pemeliharaan, promosi kebersihan) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tanggung jawab setiap tingkat pelaksana atau unit.</p>
<p>Ya, tetapi strategi tidak menyediakan secara mendalam dan rinci tentang bagaimana keahlian teknis Sanitasi Sekolah (misalnya, perencanaan, operasional dan pemeliharaan, promosi kebersihan) akan disediakan secara sistematis kepada unit pelaksana.</p>	<p>Tidak ada strategi pengembangan kapasitas manusia untuk Sanitasi Sekolah.</p>
<p>Merah</p>	<p>Tidak ada strategi sistematis untuk pengembangan kapasitas manusia yang khusus untuk Sanitasi Sekolah, namun ada beberapa inisiatif lokal yang baik.</p>
<p>Apakah pendidikan/promosi berbasis keterampilan termasuk dalam kurikulum nasional dan merupakan bagian dari kehidupan sekolah sehari-hari?</p>	<p>Ya, termasuk praktik sehari-hari untuk mempromosikan cuci tangan dengan sabun, air minum yang aman, dan praktik-praktik sanitasi yang aman.</p>
<p>Ya hal itu diajarkan, tetapi terbatas pada memberikan informasi dan tidak berbasis praktik.</p>	<p>Tidak, pendidikan kebersihan tidak termasuk dalam kurikulum nasional.</p>
<p>Kuning</p>	<p>Secara teoritis, promosi kebersihan disertakan pada kurikulum nasional. Dalam praktiknya, pelajaran promosi kebersihan tidak wajib dan tergantung pada guru, apakah mereka bersedia untuk memberikan pelajaran promosi kebersihan atau tidak.</p>

<p>Pengembangan Kapasitas</p>	<p>Apakah Sanitasi Sekolah termasuk sebagai bagian dari pelatihan manajemen pendidikan?</p>	<p>Sanitasi Sekolah termasuk dalam aspek yang relevan dari pelatihan manajemen pendidikan (manajemen kurikulum, pengawasan instruksional, manajemen sumber daya belajar, lingkungan belajar, perencanaan pendidikan, serta <i>monitoring</i> dan evaluasi) untuk kepala sekolah dan manajer sekolah.</p>	<p>Ya, tapi terbatas pada beberapa aspek dalam pelatihan manajemen pendidikan.</p>	<p>Tidak, Sanitasi Sekolah tidak termasuk dalam pelatihan manajemen pendidikan.</p>	<p>Merah</p>	<p>Sanitasi Sekolah tidak secara sistematis masuk dalam pelatihan manajemen pendidikan.</p>
--------------------------------------	---	--	--	---	---------------------	---

Sumber: Laporan Kegiatan WinS ILE

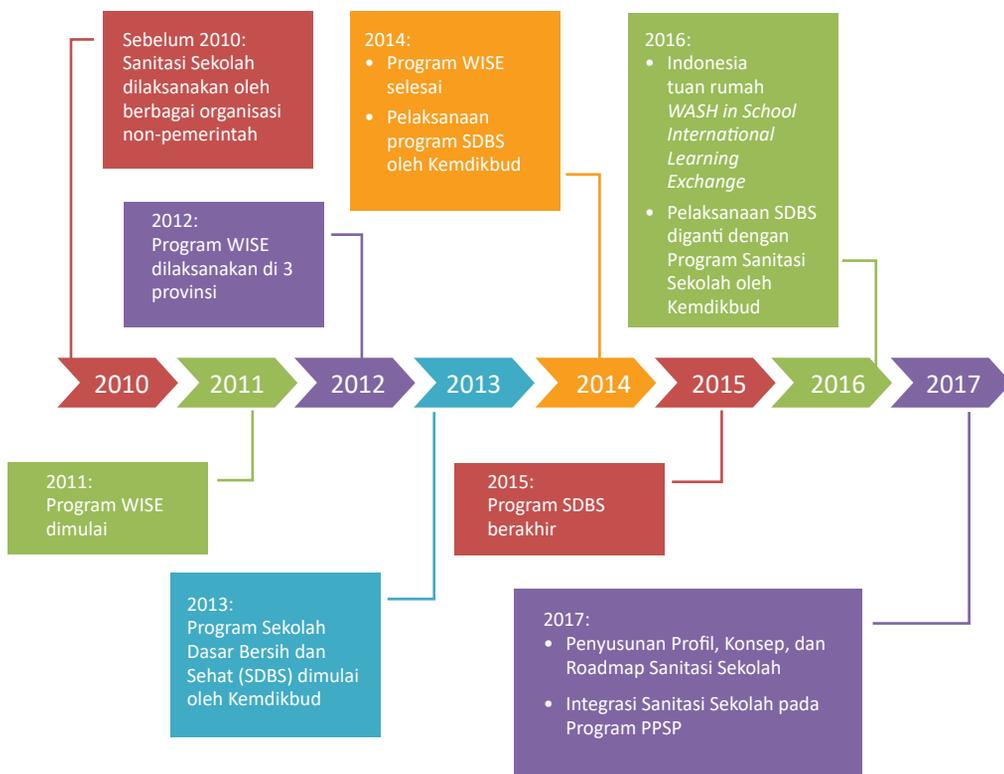
2.3 Potret Kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah

2.3.1 Sejarah Kegiatan Sanitasi Sekolah

Sanitasi Sekolah bukanlah hal baru dalam pembangunan sektor pendidikan, apalagi pada sektor pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) di Indonesia. Sejak tahun 2006, beberapa inisiatif pengembangan Sanitasi Sekolah, melalui program *Water, Sanitation, and Hygiene in Schools* atau *WASH in Schools*, telah dilaksanakan oleh beberapa mitra Pemerintah Indonesia, semisal oleh UNICEF, PLAN International Indonesia, Save the Children, CARE, GIZ Fit for Schools, dan Wahana Visi Indonesia. Secara khusus, Program *WASH in Schools Empowerment* (WISE) yang dilaksanakan bersama-sama oleh UNICEF, Save the Children, dan CARE dari tahun 2011 hingga 2013 berhasil memicu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memulai program serupa, yang diberi nama Sekolah Dasar Bersih dan Sehat (SDBS).



Sumber foto: UNICEF/2017



Gambar 2.1 Sejarah Perkembangan Sanitasi Sekolah di Indonesia

2.3.2 Kegiatan Sanitasi Sekolah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil diskusi dengan semua direktorat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang dilakukan selama periode bulan Juni hingga Juli 2017, diketahui bahwa tidak semua direktorat melaksanakan program UKS dan Sanitasi Sekolah. Selain itu, diketahui juga bahwa pengelola program UKS terdapat pada sub direktorat yang berbeda-beda.

2.3.2.1 Kegiatan UKS - Setditjen Dikdasmen Kemdikbud

Keanggotaan TP UKS/M Pusat terdiri dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Tugas TP UKS/M Pusat, sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. merumuskan kebijakan dan pedoman umum di bidang pembinaan dan pengembangan UKS/M yang bersifat nasional;
- b. melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi semua pemangku kepentingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan UKS/M;
- c. menjalin hubungan kerja dan kemitraan dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi program pembinaan dan pengembangan UKS/M secara Nasional;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri;
- f. melaksanakan ketatausahaan TP UKS/M Pusat.

Saat ini Sekretariat UKS di Kemdikbud dikoordinir oleh Bagian Umum Setditjen Dikdasmen. Kegiatan tahun berjalan 2017 antara lain Lokakarya Penyempurnaan LSS dengan mengundang perwakilan Tim Pembina UKS dari seluruh provinsi di Indonesia.

2.3.2.2 Kegiatan UKS - Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSD

Pada Direktorat PSD, pelaksanaan program kegiatan UKS menjadi tanggung jawab Sub-Direktorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana. Program Sanitasi Sekolah, program gizi anak sekolah, dan kantin sehat dijalankan sejak tahun 2016. Program Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSD bekerja sama dengan SMK dalam menganalisis kebutuhan sarana jamban sekolah termasuk mendesain jamban sekolah dengan inovatif. Paket bantuan pemerintah terkait sarana jamban sekolah dibagikan pada 315 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2016 dan 2017. Kriteria sekolah yang mendapat banpem sanitasi sekolah adalah sekolah rujukan. Jadi harapannya akan ada satu sekolah di setiap kabupaten di Indonesia yang memiliki sanitasi sekolah terbaik dan menjadi contoh bagi sekolah lainnya. Dengan adanya contoh pelaksanaan program Sanitasi Sekolah maka diharapkan program ini dapat direplikasi oleh pemerintah daerah. Di bawah ini tabel kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSD.

Tabel 2.6 Kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah di Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

Kegiatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Program Sanitasi Sekolah (pembangunan jamban sekolah)	315 sekolah	315 sekolah	275 sekolah
Penyusunan modul UKS, Sanitasi sekolah, PHBS, Kantin sehat	7 modul dicetak dan didistribusikan ke 34 provinsi	-	Penyusunan naskah manajemen sanitasi sekolah dan kantin
Program Gizi Anak Sekolah (Progas)	2 Provinsi, 4 Kabupaten	5 Provinsi, 11 Kabupaten	Progas tetap berjalan
Kantin sehat	-	315 sekolah	Kantin sehat tetap berjalan

Sumber: Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

2.3.2.3 Kegiatan UKS - Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSMP

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) mencakup jamban untuk murid dan guru. Pada setiap USB akan dibangun dua bilik/pintu untuk murid laki-laki dilengkapi dengan 4 buah urinoir dan tiga bilik/pintu untuk murid perempuan. USB juga dilengkapi dengan jamban untuk guru.

Direktorat PSMP baru akan merencanakan kegiatan khusus untuk mengembangkan UKS pada tahun 2018. Bentuk kegiatannya belum dapat dipastikan, namun tujuannya untuk mengembangkan kegiatan UKS yang dapat dilaksanakan oleh SMP. Saat ini kegiatan UKS di Direktorat PSMP adalah mengirimkan perwakilan untuk menjadi tim penilai lomba sekolah sehat. Di bawah ini tabel kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSMP.

Tabel 2.7 Kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah di Direktorat Pembinaan SMP

Kegiatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Unit Sekolah Baru (USB)	196 pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	50 Unit Sekolah Baru (USB)	Mengalokasikan anggaran kegiatan UKS & Pembangunan KM/WC dalam RKAK/L 2018

Sumber: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

2.3.2.4 Kegiatan UKS - Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSMA

Direktorat PSMA baru akan merencanakan program khusus terkait UKS pada tahun 2018. Selama ini program kegiatan UKS berada di Subdirektorat Peserta Didik dan kegiatan tersebut belum terkoordinasi dengan Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana. Pada tahun 2016, Direktorat PSMA memiliki program kantin sehat, taman, dan

toilet atau yang disingkat dengan KTT. Mekanisme pemilihan SMA yang mendapatkan program KTT adalah SMA tersebut mengajukan usulan pembangunan kantin, taman, atau toilet sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. Lalu bagi sekolah terpilih akan mendapat dana bantuan pemerintah sebesar 100 Juta Rupiah.

Tabel 2.8 Kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah di Direktorat Pembinaan SMA

Kegiatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Kantin, Taman, Toilet (KTT)	200 paket	181 paket	100 paket
Revolusi Toilet dan Kantin		Pengembangan konsep Sanitasi Sekolah dalam naskah akademik	Pelaksanaan konsep Sanitasi Sekolah
Sahabat Sekolah			Kerja sama dengan dunia usaha

Sumber: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas

2.3.2.5 Kegiatan UKS - Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSMK

Tidak ada program kegiatan sarana sanitasi khusus misalnya program pembangunan jamban pada Direktorat PSMK. Pembangunan jamban merupakan bagian dari bantuan unit sekolah baru.

Program Kegiatan UKS di PSMK menjadi tanggung jawab Subdirektorat Peserta Didik. Selama ini program kegiatan UKS berada di Subdirektorat Peserta Didik dan kegiatan tersebut belum terkoordinasi dengan Subdirektorat Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

Tabel 2.9 Kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah di Direktorat Pembinaan SMK

Kegiatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Unit Sekolah Baru	Dibangun jamban ukuran 24m ² 4 pintu	Belum ada rencana	Belum ada perencanaan
Dana Bantuan Revitalisasi sekolah	-	125 sekolah perwakilan kab/kota mendapatkan dana bantuan revitalisasi sekolah yang dapat dipergunakan untuk sanitasi sekolah dan UKS	250 sekolah perwakilan kab/kota mendapatkan dana bantuan revitalisasi sekolah yang dapat dipergunakan untuk sanitasi sekolah dan UKS

Sumber: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

2.3.2.6 Kegiatan UKS - Sanitasi Sekolah pada Direktorat PKLK

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan sekolah khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 33, sekolah luar biasa terdiri dari ruang pembelajaran, ruang pembelajaran khusus, dan ruang penunjang lainnya termasuk jamban. Rehab/infrastruktur SLB memperhatikan jamban dan aksesibilitas untuk anak berkebutuhan khusus. Misalnya, anak dengan keterbatasan fisik harus menggunakan kursi roda maka jamban didesain dilengkapi dengan jalur untuk kursi roda dan luas jamban yang cukup untuk dimasuki kursi roda. Terkait pembelajaran kebersihan diri, SLB memiliki pembelajaran Bina Diri yang masuk dalam kompetensi Sekolah Dasar Luar Biasa. Siswa SLB diajarkan untuk menggunakan pasta gigi untuk menggosok gigi, menggunakan sampo untuk keramas, dan menggunakan sabun untuk cuci tangan. Rasio toilet yang ideal untuk SLB adalah 1 toilet untuk 2-3 kelas. Saat ini minimum ada 2 toilet untuk setiap jenjang SLB. Masalah yang masih sering

timbul pada sekolah SLB adalah perawatan toilet. Siswa SLB tidak seperti siswa pada umumnya di sekolah biasa, sehingga tidak bisa dilibatkan dalam proses pembersihan lingkungan dengan menyusun jadwal piket. Dengan demikian sekolah SLB mengandalkan tenaga kebersihan untuk menjaga kebersihan jamban. Selain itu masalah lainnya terkait toilet adalah tidak adanya drainase dan *septic tank*.

Tabel 2.10 Kegiatan UKS dan Sanitasi Sekolah di Direktorat Pembinaan PKLK

Kegiatan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Rehab/ Infrastruktur	Jamban Aksesibilitas	Rehab jamban masuk dalam banper rehab dan renovasi sekolah	DAK rehab jamban; banper rehab diprioritaskan untuk jamban/sanitasi; renovasi sekolah/ lanjutan termasuk rehab jamban dan penyempurnaan kelengkapan aksesibilitas
Unit Sekolah Baru	Ruang UKS	Ruang UKS	Ruang UKS
	Jamban dengan kloset duduk dan jamban dengan kloset jongkok beserta kelengkapan aksesibilitasnya	Jamban dengan kloset duduk dan jamban dengan kloset jongkok beserta kelengkapan aksesibilitasnya	Jamban dengan kloset duduk dan jamban dengan kloset jongkok beserta kelengkapan aksesibilitasnya
Naskah	Belum ada perencanaan	Pemeliharaan dan perawatan bangunan	Perencanaan Sanitasi
			Pemeliharaan dan Perawatan Sanitasi

Sumber: Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

2.3.3 Kegiatan Sanitasi Sekolah di Kementerian lain

Terdapat berbagai kegiatan yang berkaitan dengan Sanitasi Sekolah di berbagai kementerian, terutama pada kementerian yang

menandatangani Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 6/x/pb/2014, Nomor: 73 tahun 2014, Nomor: 41 tahun 2014, Nomor: 81 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

2.3.3.1 Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan saat ini melaksanakan program Model Sekolah/Madrasah Sehat di 34 Provinsi. Kegiatan ini berfokus pada pelaksanaan trias UKS/M yaitu, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sehat. UNICEF bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam mengembangkan dan mendistribusikan buku komik Manajemen Kebersihan Menstruasi. Buku komik ini didistribusikan di 340 Sekolah Dasar dan Madrasah di 34 Provinsi lokasi Model Sekolah Sehat.

2.3.3.2 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sejak Tahun 2006, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan program Adiwiyata. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata, Sanitasi Sekolah merupakan salah satu indikator yang diperhatikan. Lebih jelasnya, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Dan Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan.

Program Adiwiyata merupakan wujud perhatian dan penghargaan pemerintah kepada sekolah yang dinilai berhasil mendidik siswa menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Seleksi pemberian penghargaan Adiwiyata ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai pusat, melalui proses seleksi administrasi, penilaian dokumen, dan verifikasi lapangan, serta melibatkan berbagai pihak. Kriteria penilaian Adiwiyata harus memenuhi empat komponen, yaitu kebijakan sekolah/madrasah, kurikulum, kegiatan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana dan prasarana, yang ke semuanya harus berwawasan lingkungan hidup.

2.3.3.3 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki program Duta Sanitasi yang fokus pada siswa usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejak tahun 2008. Hingga saat ini setidaknya terdapat 2000 Duta Sanitasi tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu agenda kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Jambore Sanitasi bagi Duta Sanitasi yang terpilih dari seluruh provinsi di Indonesia.

Gerakan Peduli Sanitasi dimulai dengan pemilihan Duta Sanitasi di setiap provinsi di Indonesia. Acara Jambore Sanitasi Nasional diperuntukkan bagi siswa pelajar dari umur 7-15 tahun yang dinilai usia yang efektif sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kondisi sanitasi yang lebih baik di lingkungan sekolah dan rumah. Pemilihan Duta Sanitasi menjadi kebanggaan bagi anak-anak Indonesia karena selain mendapat

pengetahuan yang lebih luas tentang bidang sanitasi (air limbah, sampah, drainase) juga dapat mengunjungi Istana Negara atau Istana Wakil Presiden, berinteraksi dengan Ibu Negara untuk mendapatkan pesan-pesan langsung mengenai sanitasi. Harapannya, Gerakan Peduli Sanitasi bisa menumbuhkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat, cerdas, sejahtera, dan mampu bersaing di dunia internasional. Karena pembangunan sanitasi tidak hanya masalah infrastruktur, perlu dukungan dari seluruh pemangku kebijakan melalui peningkatan kesadaran – edukasi dan kampanye perubahan perilaku untuk peduli sanitasi.

Selain Duta Sanitasi, KemenPUPERA juga memiliki kegiatan Sanitasi Sekolah dalam program nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS). Program yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan khususnya masyarakat di desa tertinggal dan di pinggiran kota ini salah satu kegiatan utamanya adalah penyediaan sarana Sanitasi Sekolah.

Salah satu kegiatan Kesehatan Sekolah Program PAMSIMAS adalah membangun jamban sekolah dan sarana cuci tangan. Sekolah harus memberikan pengajaran baik kepada guru maupun murid bagaimana cara memelihara jamban sekolah yang akan dibangun dan sarana cuci tangan. Misalnya, seorang guru diserahkan tanggung jawab untuk pemeliharaan jamban. Ia akan mengoordinasi murid dengan cara membuat “*roster*” atau jadwal membersihkan jamban dan sarana cuci tangan yang dibagi secara merata antara murid laki-laki dan murid perempuan. Sering kali terjadi jamban di sekolah hanya terdiri atas dua unit, yaitu satu untuk guru dan yang lain untuk murid, sementara kondisi jamban murid sangat berbeda jauh dengan

jamban guru. Jamban murid sangat jauh dari kondisi bersih dan terpelihara atau tidak jarang dalam kondisi rusak. Akibatnya banyak murid yang kemudian buang air kecil maupun buang air besar di halaman sekolah. Kebiasaan ini membuat sekolah menjadi bau dan sangat rentan untuk menjadi sarang penyakit. Selain itu, sering kali jamban di sekolah tidak dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Murid yang masih duduk di kelas 1 atau 2 akan merasa takut untuk menggunakan jamban yang kondisinya gelap, berbau, dan kotor. Kondisi seperti ini harus dihindari dengan cara membuat jamban dengan penerangan yang cukup baik dari lampu ataupun sinar matahari beserta ventilasi yang memadai.

Selain program pembangunan fisik, program pendidikan kesehatan tentang hubungan antara air, jamban, perilaku, dan kesehatan juga menjadi kegiatan yang penting dalam program kesehatan sekolah. Di antaranya adalah hubungan antara air-kondisi sanitasi dan penyakit, bagaimana sarana sanitasi dapat melindungi kesehatan, bagaimana penyakit dapat timbul dari kondisi sanitasi dan perilaku yang buruk, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, pencegahan penyakit kecacingan; dan *monitoring* kualitas air. Materi-materi pembelajaran bagi siswa dilaksanakan secara partisipatif menggunakan metode PHAST. Guru-guru sebagai tenaga pengajar akan diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Dinas Kesehatan setempat dan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), khususnya TFM bidang kesehatan.

Selama periode proyek berjalan, diharapkan setiap kabupaten/kota sudah melakukan kegiatan replikasi sebanyak 1 s/d 3 desa untuk setiap 10 desa/kelurahan peserta program PAMSIMAS sesuai kemampuan fiskal kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan replikasi dimulai paling tidak setelah kabupaten/kota menyelesaikan program PAMSIMAS di 10 desa/

kelurahan. Keberhasilan program di suatu desa dapat dijadikan sebagai model untuk direplikasi. Pendanaan kegiatan replikasi desa berasal sepenuhnya dari APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat. Kegiatan replikasi diharapkan dapat mempercepat pencapaian target SDGs di sektor penyediaan air minum dan sanitasi melalui penyediaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Berbasis Masyarakat, meningkatkan peran Pemda untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin di daerahnya, dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola sarana air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat.

2.3.3.4 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Merujuk pasal 4 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Sistem pendidikan yang dimaksud adalah berpijak kepada konsep pembelajaran "*children centered*". Artinya sebuah pendidikan yang didesain dengan konsep yang berpusat kepada anak dan bukan lagi berpusat kepada guru. Sekolah Ramah Anak merupakan model pembelajaran yang menerapkan konsep pembelajaran "*children centered*". Pengertiannya secara harfiah adalah sekolah yang memang berpusat kepada hak dan kebutuhan anak. Sekolah Ramah Anak akan menjadi wadah yang tepat bagi semua anak untuk dapat mengenyam pendidikan dengan model pembelajaran khusus yaitu mengutamakan hak-hak anak.

Sekolah Ramah Anak merupakan dunia yang bersinergi dengan realitas keseharian anak didik dalam keluarga kerana pencapaian cita-cita seorang anak didik tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan sehari-hari. Sekolah Ramah Anak idealnya memberikan perlindungan dalam berbagai bidang yang dibutuhkan anak, antara lain menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai. Sehubungan dengan hal ini Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Dokter Kecil harus dimaksimalkan sekaligus berusaha melakukan jejaring dengan berbagai instansi lainnya. Di samping itu, anak juga berhak mendapatkan fasilitas air bersih dan sanitasi yang memadai untuk kesehatan tubuhnya dan demi kelangsungan kehidupannya. Oleh karenanya, Sekolah Ramah Anak harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan anak sehingga menghasilkan generasi muda yang sehat dan cerdas.

2.3.3.5 Kementerian Pertanian

Badan Ketahanan Pangan melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementan telah mengadakan kontrak kerja sama dengan AVRDC-*The World Vegetable Center* selama 3 tahun mulai 2013-2015 untuk mengadakan riset tentang pengembangan kebun sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di 6 negara yaitu Indonesia, Filipina, Tanzania, Nepal, Bhutan, dan Burkina Faso untuk mencari model yang akan digunakan dalam mengembangkan kebun sekolah di dunia. Hal tersebut didasari atas masih rendahnya konsumsi sayuran dikalangan masyarakat khususnya anak-anak. Mengingat sayuran sangat penting untuk gizi dan kesehatan tubuh manusia.

Pada tahap awal pelaksanaan, dilakukan pengambilan data kepada 30 sekolah yang telah terpilih untuk menjadi sampel. 30 sekolah tersebut terbagi menjadi 3 kategori/kriteria yaitu: 10 sekolah adalah penerima manfaat kegiatan kebun sekolah P2KP tahun 2013 dan AVRDC yang akan dijadikan *pilot project*, 10 sekolah hanya penerima manfaat kegiatan kebun sekolah P2KP tahun 2013, dan 10 sekolah tanpa bantuan apa-apa. Masing-masing sekolah diambil sebanyak 50 siswa yang terdiri dari 25 anak siswa kelas 4 dan 25 lainnya siswa kelas 5.

Pengambilan data meliputi tinggi badan, berat badan, lingkaran lengan siswa, serta data pribadi yang meliputi tanggal lahir, jarak rumah, keluarga, dan orang tua. Pada kuesioner tersebut siswa diminta menjawab pertanyaan tentang jenis makanan yang dimakan, disukai dan nama beberapa jenis sayuran dan makanan sehat termasuk pertanyaan tentang pola hidup sehat dan bersih termasuk kebiasaan cuci tangan pakai sabun sebelum makan.

2.3.3.6 Kegiatan Sanitasi Sekolah di Kementerian Agama

Hingga saat ini belum ada kegiatan terkait Sanitasi Sekolah di lingkungan Kementerian Agama. Namun pada Tahun 2017, Kementerian Agama telah menyatakan komitmen untuk memasukkan indikator Sanitasi Sekolah kedalam sistem *Education Management Information System (EMIS)*.

2.3.4 Kegiatan Sanitasi Sekolah oleh Pemerintah Daerah

Selain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, terdapat inisiatif pengembangan Sanitasi Sekolah yang dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah. Meskipun belum menjadi prioritas utama, namun

peran aktif Pemerintah Daerah perlu diapresiasi karena berkontribusi secara signifikan dalam menyelesaikan permasalahan sanitasi di Indonesia. Berikut ini inisiatif yang ada dari beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki program unggulan yang dikenal dengan sebutan Sanisek atau Sanitasi Sekolah. Kabupaten Tangerang memiliki visi dan komitmen yang jelas terhadap pembangunan Sanisek ini dan bertekad sampai dengan Tahun 2018, semua sekolah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Tangerang memiliki sarana prasarana Sanisek sebagai bagian dari mewujudkan Sekolah Standar Nasional. Sampai dengan tahun 2017, dapat dikatakan Kabupaten Tangerang adalah sebagai salah satu daerah dengan pembangunan sanitasi sekolah terbaik di Indonesia. Sejak dimulai Program Sanisek pada tahun anggaran 2013, hampir semua sekolah negeri di seluruh pelosok Kabupaten Tangerang telah mendapat kucuran dana pembangunan sarana sanitasi sekolah. Anggaran itu berasal dari APBD dan partisipasi mitra-mitra. Mulai tahun anggaran 2018, giliran sekolah-sekolah swasta mendapat bantuan pengadaan Sanitasi Sekolah.

Belum banyak Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Alokasi dana Khusus (DAK) Pendidikan untuk meningkatkan kondisi Sanitasi Sekolah di daerahnya. Hal ini berbeda dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki komitmen yang kuat, sehingga berhasil mengalokasikan dana DAK Pendidikan untuk meningkatkan kondisi Sanitasi Sekolah di beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu Utara.

Inisiatif lain dalam mendorong peningkatan akses pada Sanitasi Sekolah juga diperlihatkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan yang menyusun dokumen perencanaan Strategi Pengembangan Sekolah Sehat dan Menyenangkan. Dokumen perencanaan ini berisi kondisi eksisting Sanitasi Sekolah dan juga rencana pengembangannya.

Pada Tahun 2017, beberapa kabupaten di Indonesia mencoba untuk menyisipkan komponen Sanitasi Sekolah pada dokumen perencanaan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Pengembangan SSK merupakan bagian dari Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang dilaksanakan oleh beberapa kementerian/lembaga, seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Melalui integrasi ini, diharapkan isu Sanitasi Sekolah dapat menjadi prioritas pembangunan di daerah. Inisiatif integrasi Sanitasi Sekolah kedalam dokumen SSK ini dilaksanakan di 7 kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kota Samarinda, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Garut dan Kabupaten Cirebon.

2.3.5 Kegiatan Sanitasi Sekolah di lembaga non-pemerintah

Berdasarkan draft *Peta Jalan* Sanitasi Sekolah yang dikembangkan oleh Bappenas Tahun 2012 dan dokumen pemetaan Sanitasi Sekolah yang didukung penyusunannya oleh UNICEF pada Tahun 2014, terdapat beberapa lembaga non-pemerintah dan perusahaan swasta yang memiliki program terkait Sanitasi Sekolah. Tidak semua kegiatan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.



2.3.5.1 UNICEF

Sejak tahun 2006 hingga 2010, UNICEF melakukan kegiatan Sanitasi Sekolah atau yang dikenal dengan sebutan *WASH in Schools* di 500 Sekolah Dasar di 6 provinsi; Provinsi NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Kegiatan ini menjangkau sekitar 2000 guru dan 100.000 murid. Inisiatif *WASH in Schools* dilanjutkan pada tahun 2010

dengan dukungan dari Dubai Care melalui program *WASH in School Empowerment* atau WISE. UNICEF melalui program WISE menunjukkan bahwa dengan mengalokasikan investasi pada kurang lebih 26 juta siswa sekolah, akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kondisi air minum dan sanitasi 10% penduduk di Indonesia. Tujuan program WISE adalah penyediaan akses sanitasi dan peningkatan kapasitas pengelolaan sanitasi sekolah pada 6 kabupaten lokasi kerja UNICEF di Indonesia bagian timur. Ada pun komponen kegiatan WISE adalah perubahan perilaku, manajemen sanitasi sekolah, peningkatan pada akses fasilitas sanitasi, mengembangkan sekolah sebagai pusat pembelajaran dan komponen terakhir adalah pengembangan tata kelola Sanitasi Sekolah.

Hingga Tahun 2017, UNICEF masih mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses pada Sanitasi Sekolah. Dalam lima tahun terakhir, fokus dukungan UNICEF pada pengembangan model sarana cuci tangan pakai sabun berkelompok di lokasi sekolah-sekolah dampingan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam menumbuhkan kebiasaan sejak dini. Cuci tangan pakai sabun secara berkelompok pada jam istirahat dimaksudkan agar menjadi kegiatan rutin. Dilakukan bersama-sama agar semua siswa dapat serempak menjadikannya sebagai kebiasaan.



2.3.5.2 GIZ Fit for Schools

GIZ sebagai organisasi mitra pembangunan dari Jerman menjalankan proyek Regional Fit for School dimulai pada bulan Desember 2011 dan termasuk di dalamnya adalah fase penelitian serta pengembangan sekolah model sampai dengan November 2015. Fit for School bercita-cita untuk mengubah

sekolah menjadi lingkungan belajar yang sehat dan kondusif sambil mempromosikan pengembangan karakter, sehingga memungkinkan ekosistem pendidikan untuk sepenuhnya mendukung pembelajaran. Hal ini dicapai dengan mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kebersihan berkelompok dan pembersihan rutin dan mengembangkan kebiasaan penting untuk hidup sehat. Kegiatan meliputi cuci tangan berkelompok dengan sabun dan menggosok gigi dengan pasta gigi ber fluoride dan minum obat cacing dua kali dalam satu tahun melalui pengawasan yang ketat dari guru dan siswa yang dilatih untuk memfasilitasi kegiatan kebersihan sehari-hari.

Tim Kesehatan Sekolah Provinsi Jawa Barat (UKS) adalah mitra pelaksana utama Program Fit for School di Indonesia, di Jawa Barat program dimulai pada tahun 2012 dan pada awalnya diimplementasikan di 12 sekolah model di Bandung dan Indramayu. Pada tahun 2014, pengalaman penerapan Fit for School di Jawa Barat dikonsolidasikan ke dalam Buku Panduan Komunitas Sekolah dan Video Orientasi Dasar, yang kemudian didistribusikan untuk semua kota/kabupaten di Jawa Barat melalui inisiatif GEMA MAPAN (Gerakan Penyelamatan Masa Depan) pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Kota Bandung mengadopsi intervensi tersebut sebagai bagian dari program Senyum Pagi (Sehat dan Nyaman untuk Semua karena Cuci Tangan Pakai Sabun dan Gosok Gigi) untuk 100 Sekolah Dasar. Melalui pendistribusian Buku Panduan Komunitas Sekolah Manual Komunitas Sekolah dan upaya advokasi Tim UKS Jawa Barat serta Kementerian Kesehatan, 146 sekolah di luar Bandung dan Indramayu di 6 provinsi telah mereplikasi kegiatan kebersihan berkelompok sehari-hari baik melalui inisiatif mereka sendiri maupun dengan dukungan dari LSM: 18 di Jawa Barat PartnerAid dan Universitas Padjadjaran, 4 di Sulawesi

Selatan dan 4 di Papua Barat melalui UNICEF, 100 di Riau, 16 di Kalimantan Selatan, 2 di Bali, dan 2 di Sumatera Barat.

Tahap berikutnya dari Program Fit for School akan dimulai pada bulan Desember 2015 dan terdapat beberapa usulan kegiatan sebagai berikut: mendukung mitra pemerintah untuk mencapai standar minimum untuk WinS; meningkatkan kapasitas manajemen di level provinsi, kota/kabupaten untuk mengatur program WinS-semua dibangun berdasarkan pengalaman/pembelajaran dari tahap I; membangun dan menggunakan model yang sesuai dengan konteks lokal di setiap wilayah untuk pengembangan program; memperkuat mekanisme akuntabilitas sosial; koordinasi dan keselarasan dari intervensi donor yang sudah ada untuk WinS; menggunakan pembelajaran dalam operasional dan pemeliharaan dari fasilitas sanitasi.



Sumber foto: UNICEF/2017



2.3.5.3 PLAN International Indonesia

Plan Indonesia merupakan organisasi pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada anak. Plan Indonesia telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1969 dengan misi untuk mewujudkan dunia yang ramah dan berkeadilan untuk anak. Akses terhadap Air, Sanitasi dan Hygiene merupakan hak yang harus dipenuhi oleh masyarakat termasuk anak. Dalam rangka mendorong pemenuhan hak anak terhadap akses air, sanitasi, dan hygiene Plan Indonesia melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) di sekolah. Melalui STBM dan MKM Plan Indonesia bekerja sama dengan POKJA AMPL dan Tim STBM di Kecamatan dan Desa melakukan kampanye 5 Pilar STBM berdasarkan Permenkes No.3/2014 yakni 1)STOP Buang Air Besar Sembarangan 2)Cuci Tangan Pakai Sabun 3)Konsumsi Air Minum dan Makanan yang Aman 4)Pengolahan Sampah dan 5) Pengolahan Limbah Cair. Plan Indonesia bersama POKJA AMPL dan Tim STBM juga melakukan kampanye MKM di sekolah dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, guru dan siswa/siswi tentang pentingnya kebersihan menstruasi.

Melalui STBM dan MKM Plan Indonesia mendorong pemerintah dan sekolah untuk memberikan perhatian terhadap isu ini yang akan memberikan dampak terhadap anak. Saat ini Plan Indonesia telah melaksanakan program STBM dan MKM di lebih dari 250 sekolah dasar yang tersebar di 15 Kota/Kabupaten di provinsi DKI, NTB dan NTT. Dengan meningkatnya kesadaran dan akses terhadap air, sanitasi dan hygiene diharapkan angka kesakitan diare akan menurun sehingga hal ini dapat berdampak pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia khususnya anak-anak.



2.3.5.4 SNV

Pada tahun 2014-2017, SNV -organisasi pembangunan yang berasal dari Belanda- melaksanakan program “Mendukung Pelaksanaan STBM di Provinsi Lampung” dengan dukungan pendanaan dari Kedutaan Besar Kerajaan Belanda. Program ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu, dan Tanggamus, dengan salah satu tujuannya adalah 40 sekolah memiliki akses terhadap sanitasi layak, fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS), dan fasilitas Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM).



Sumber foto: UNICEF/2017

Pendekatan yang SNV lakukan adalah (1) meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan murid khususnya Pilar 1 & 2 STBM; (2) memperkuat perencanaan sanitasi sekolah dengan menyusun strategi sanitasi sekolah dan melaksanakan Rencana Kerja Sanitasi Sekolah (RKSS); (3) mendukung pemerintah daerah dan pihak sekolah dalam upaya perubahan perilaku, terutama dalam mengkreasikan pemicu visual/gambar untuk meningkatkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun; (4) mendukung penyusunan panduan nasional untuk Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) dan sosialisasi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.



2.3.5.5 Wahana Visi Indonesia

Wahana Visi Indonesia turut mendukung Sanitasi Sekolah melalui beberapa pendekatan dan program, antara lain sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah hijau, dan gerakan STBM di sekolah.

Tujuannya selain untuk membiasakan anak-anak berperilaku bersih dan sehat, juga untuk mendorong sekolah dan komite sekolah agar mengupayakan warga sekolah dapat mengakses air bersih dan sanitasi yang layak dan memadai, termasuk apabila ada kondisi bencana karena sekolah sering kali menjadi lokasi pengungsian sementara. Sasaran utama program ini adalah sekolah dasar, walaupun di beberapa wilayah turut menysasar pra-sekolah dasar. Program ini dilakukan di wilayah perkotaan seperti Jakarta dan perdesaan seperti Jayawijaya.



2.3.5.6 CARE Indonesia

CARE International Indonesia telah mempromosikan program Sanitasi Sekolah di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir melalui pendekatan anak-ke-anak. CARE memberikan penekanan pada sosialisasi dan dialog dengan pemerintah lokal dan stakeholder lainnya sebagai upaya keberlanjutan program. Sasaran Program Sanitasi Sekolah CARE adalah untuk peningkatan kualitas hidup anak melalui pengurangan kejadian diare dan penyakit infeksi di tingkat Sekolah Dasar, serta meningkatnya angka kehadiran di sekolah terkait dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi. Disamping itu program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Lembaga Lokal dan stakeholder terkait untuk dapat mendukung program Sanitasi Sekolah serta promosi praktik perilaku kesehatan dan nutrisi yang baik.



2.3.5.7 Yayasan Sayangi Tunas Cilik

Melalui program Sponsorship di Sumba Barat dan Sumba Tengah yang berlangsung 2013-2023, Yayasan Sayangi Tunas Cilik sebagai mitra Save the Children telah mengembangkan strategi penguatan akses sanitasi sekolah dan pendidikan kesehatan setiap 3 tahun. Pada strategi program Sponsorship 2017-2019, penguatan sanitasi sekolah ditujukan untuk peningkatan kualitas lingkungan sekolah melalui promosi kesehatan, kebersihan, nyaman dan keselamatan. Dukungan bagi konstruksi dan rehabilitasi fasilitas Sanitasi Sekolah yang ramah anak dan mengakomodir pengarusutamaan MKM yaitu pemisahan toilet laki-laki dan perempuan menjadi salah satu prioritas. Kegiatan advokasi dana BOS bagi pemanfaatan pemeliharaan dan operasional sarana Sanitasi Sekolah juga dijalankan melalui revitalisasi TP UKS/M kabupaten pada tahun 2017-2018 untuk

memastikan keberlanjutan sarana tingkat sekolah. Hingga Tahun 2017, program Sponsorship telah menjangkau penerima manfaat anak kuranglebih sebesar 9.381 anak yang tersebar di 72 sekolah di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah.

2.3.5.8 Pihak Swasta/*Corporate Social Responsibility (CSR)*

Beberapa perusahaan swasta besar memiliki program yang terkait dengan Sanitasi Sekolah, misalnya Unilever memiliki program Sekolah Sehat yang dijalankan oleh mitra LSM lokal di 15 provinsi yang menjangkau sekitar 8000 Sekolah Dasar. Program sekolah sehat bertujuan untuk membangun generasi yang aktif dan cerdas melalui promosi dan peningkatan PHBS. Sasaran program ini adalah peserta didik usia 6-12 tahun agar dapat membentuk sekolah sehat dengan metode 7 pembiasaan hidup bersih dan sehat. Tujuh pembiasaan yaitu CTPS; makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman; minum air bebas kuman; sikat gigi pagi dan malam; toilet, kamar mandi dan lantai bersih higienis; kelola sampah disekolah; kegiatan 3 M plus.

Selain itu ada juga kegiatan PHBS yang didukung oleh Nestle yang bekerjasama dengan beberapa LSM lokal. Program ini di kenal dengan Nestlé Healthy Kids (NHK). Program NHK sendiri memiliki 3 (tiga) fokus yaitu Fokus 1. Gizi, Fokus 2. Kegiatan fisik, Fokus 3. Kebersihan diri & Lingkungan. NHK memfasilitasi kurang lebih 200 sekolah yang tersebar kurang lebih di 19 kota dan kabupaten di Indonesia, yaitu Aceh, Medan, Tanggamus, Bandar Lampung, DKI Jakarta, Tangerang, Karawang, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Malang, Kejayan, Pujon, Mamuju, Balikpapan, Makasar.

Baseline, Milestone dan Target Sanitasi Sekolah

3.1 *Baseline* Indikator Sanitasi Sekolah Tahun 2017

Target dan indikator pengembangan Sanitasi Sekolah disepakati dengan *baseline* data nasional mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan hingga Sekolah Luar Biasa, sebagai berikut:

3.1.1 *Baseline* Sekolah Dasar

Indikator Utama sesuai dengan SDGs

- Persentase SD dengan sumber air cukup sepanjang waktu 64,76%
- Persentase SD dengan kondisi jamban sekolah yang layak, terpisah, dan dalam kondisi baik atau rusak ringan 31,40%
- Persentase SD dengan sarana cuci tangan 65,10%

Indikator Tambahan

- Rasio Jamban murid dan guru laki-laki 1:105
- Rasio Jamban murid dan guru perempuan 1:97
- Persentase SD dengan UKS sebesar 30,29%

3.1.2 *Baseline Sekolah Menengah Pertama*

Indikator Utama sesuai dengan SDGs

- Persentase SMP dengan sumber air layak dan cukup sepanjang waktu 65,03%
- Persentase SMP dengan kondisi jamban sekolah yang layak, terpisah, dan dalam kondisi baik atau rusak ringan 13,3%
- Persentase SMP dengan sarana cuci tangan 60,19%

Indikator Tambahan

- Rasio Jamban murid dan guru laki-laki SMP 1:129
- Rasio Jamban murid dan guru perempuan SMP 1:125
- Persentase SMP dengan UKS sebesar 39,64%

3.1.3 *Baseline Sekolah Menengah Atas*

Indikator Utama sesuai dengan SDGs

- Persentase SMA dengan sumber air layak dan cukup sepanjang waktu 70,40%
- Persentase SMA dengan kondisi jamban sekolah yang layak, terpisah, dan dalam kondisi baik atau rusak ringan 15,59%
- Persentase SMA dengan sarana cuci tangan 68,72%

Indikator Tambahan

- Rasio Jamban murid dan guru laki-laki SMA 1:168
- Rasio Jamban murid dan guru perempuan SMA 1: 129
- Persentase SMA dengan UKS sebesar 41,9%

3.1.4 *Baseline Sekolah Menengah Kejuruan*

Indikator Utama sesuai dengan SDGs

- Persentase SMK dengan sumber air layak dan cukup sepanjang waktu 74,65%
- Persentase SMK dengan kondisi jamban sekolah yang layak, terpisah, dan dalam kondisi baik atau rusak ringan 17,57%
- Persentase SMK dengan sarana cuci tangan 68,86%

Indikator Tambahan

- Rasio Jamban murid dan guru laki-laki SMK 1:145
- Rasio Jamban murid dan guru perempuan SMK 1:188
- Persentase SMK dengan UKS sebesar 29,96%

3.1.5 *Baseline Pendidikan Luar Biasa*

Indikator Utama sesuai dengan SDGs

- Persentase SLB dengan sumber air layak dan cukup sepanjang waktu 64,76%
- Persentase SLB dengan kondisi jamban sekolah yang layak, terpisah, dan dalam kondisi baik atau rusak ringan 10,39%
- Persentase SLB dengan sarana cuci tangan 77,83%

Indikator Tambahan

- Rasio Jamban murid dan guru laki-laki SLB 1:36
- Rasio Jamban murid dan guru perempuan SLB 1:22

3.2 Milestone dan Target Indikator Utama Sanitasi Sekolah

Dari semua indikator di atas, maka yang dijadikan acuan dalam penyusunan Peta Jalan ini adalah indikator utama yang harus tercapai berdasarkan target SDGs, yaitu sarana air layak dan cukup, jamban layak dan terpisah, dan sarana cuci tangan. Berikut ini tercantum baseline dan target jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang Sanitasi Sekolah untuk semua jenjang pendidikan.

Tabel 3.1 Milestone Sanitasi Sekolah 2017-2030

Indikator SDG	Jenjang	Kondisi Saat ini 2017	Target Jangka Pendek 2019	Target Jangka Menengah 2024	Target Jangka Panjang 2030
Sarana air layak dan cukup	SD	64,76%	80%	90%	100%
	SMP	65,03%	70%	85%	100%
	SMA	70,40%	75%	90%	100%
	SMK	74,65%	80%	90%	100%
	SLB	76,47%	80%	85%	100%
Jamban layak, dan terpisah	SD	31,40%	40%	55%	100%
	SMP	41,88%	50%	60%	100%
	SMA	35,82%	45%	55%	100%
	SMK	41,36%	50%	60%	100%
	SLB	29,95%	40%	55%	100%
Sarana Cuci Tangan	SD	65,1%	70%	85%	100%
	SMP	60,19%	65%	85%	100%
	SMA	68,72%	75%	90%	100%
	SMK	68,86%	75%	90%	100%
	SLB	77,83%	85%	95%	100%

Sumber: Kesepakatan pada Konsultasi Publik *Peta Jalan* Sanitasi Sekolah tanggal 22 September 2017 di Ruang Graha Utama Gedung A Kemendikbud

3.3 Simulasi Investasi Pencapaian Target Sanitasi Sekolah

Untuk mendapatkan informasi besaran investasi yang diperlukan dalam rangka mencapai target Sanitasi Sekolah, dilakukan simulasi atau perhitungan sederhana berdasarkan asumsi jumlah sekolah yang belum terlayani, dan asumsi *unit cost* untuk penyediaan sarana jamban sekolah dan sarana cuci tangan. Misalnya pembangunan sarana jamban mengambil contoh program Sanitasi Sekolah direktorat SD, yaitu sebesar 100 Juta Rupiah per sekolah. Sedangkan sarana cuci tangan mengambil contoh dari kegiatan UNICEF, sebesar 10 Juta Rupiah per sekolah. Namun perhitungan investasi ini belum termasuk penyediaan akses pada sumber air layak. Hal ini karena sumber air terkadang harus disediakan oleh jaringan perpipaan skala kota atau desa. Dengan metode tersebut, maka total biaya investasi untuk jenjang SD, SLB, SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia adalah sebesar 14,9 Trilyun Rupiah.

Tabel 3.2 Perhitungan investasi Sanitasi Sekolah untuk semua jenjang

No.	Provinsi	Total Investasi
1	DKI Jakarta	40,914,528,302
2	Jawa Barat	2,029,066,378,738
3	Banten	472,009,486,166
4	Jawa Tengah	1,444,598,903,151
5	DI Yogyakarta	103,400,000,000
6	Jawa Timur	1,914,078,660,834
7	Aceh	417,935,443,787
8	Sumatera Utara	1,024,142,271,415
9	Sumatera Barat	387,506,559,486
10	R i a u	348,300,000,000
11	Kepulauan Riau	74,210,000,000
12	J a m b i	261,530,000,000
13	Sumatera Selatan	456,543,481,990
14	Bangka Belitung	42,510,000,000

15	Bengkulu	148,910,000,000
16	Lampung	489,884,936,170
17	Kalimantan Barat	422,681,695,761
18	Kalimantan Tengah	292,520,000,000
19	Kalimantan Selatan	260,960,000,000
20	Kalimantan Timur	170,267,089,202
21	Kalimantan Utara	50,220,000,000
22	Sulawesi Utara	252,966,388,889
23	Gorontalo	92,788,771,930
24	Sulawesi Tengah	342,421,625,616
25	Sulawesi Selatan	659,179,240,283
26	Sulawesi Barat	167,121,250,000
27	Sulawesi Tenggara	298,630,000,000
28	Maluku	236,524,847,328
29	Maluku Utara	180,697,796,610
30	B a l i	180,998,490,566
31	Nusa Tenggara Barat	356,101,074,919
32	Nusa Tenggara Timur	603,578,658,537
33	Papua	288,121,720,930
34	Papua Barat	119,380,000,000
	Indonesia	14,830,699,300,607

Sumber: Analisis Investasi

Catatan: detail perhitungan terlampir

Konsep Sanitasi Sekolah

Sebuah sekolah dapat dikatakan menerapkan Sanitasi Sekolah yang baik apabila sekolah tersebut dapat memenuhi tiga aspek yang saling berkaitan satu dengan lainnya. *Pertama*, sekolah memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, terutama akses pada sarana air bersih yang aman dari pencemaran, sarana sanitasi (jamban) yang berfungsi dan terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan, serta fasilitas cuci tangan pakai sabun.

Kedua, sekolah melaksanakan kegiatan pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), seperti kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) secara rutin dan memastikan pelaksanaan Manajemen Kebersihan Menstruasi (MKM) secara konsisten. *Ketiga*, adanya dukungan manajemen sekolah untuk mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan sarana sanitasi dan biaya kegiatan PHBS.



Gambar 4.1 Konsep Sanitasi Sekolah

4.1 Komponen *Supply* (Peningkatan Kebutuhan Sarana Sanitasi Sekolah)

Komponen sarana prasarana Sanitasi Sekolah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah. Standar Sarana dan Prasarana ini merupakan salah satu dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang harus dipenuhi berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005. Berdasarkan standar tersebut, menyebutkan kebutuhan sarana sanitasi yang harus ada di sekolah.

4.1.1 Penyediaan sarana Jamban Sekolah

Sekolah sekurang-kurangnya memiliki tiga unit jamban. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Sedangkan untuk sebuah SMP sekurang-kurangnya memiliki jamban setidaknya tiga unit. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Luas minimum jamban adalah 2m² serta tersedia air bersih di setiap unit jamban. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.

4.1.2 Penyediaan sarana air bersih

Menyediakan air bersih merupakan prasyarat bagi beroperasi dan berfungsinya sarana sanitasi dan pelaksanaan PHBS di sekolah. Sekolah harus menjamin ketersediaannya dalam jumlah minimal 15 liter/orang/hari dengan kualitas yang memenuhi syarat kesehatan., meliputi:

- Letak sumber air bersih berjarak 10 meter dari tanki septik.
- Air harus bersih, jernih, dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih.
- Kuantitasnya cukup untuk keperluan kamar mandi, jamban, dan air minum.
- Memiliki penampungan air dan tertutup.
- Jarak kamar mandi, perturasan, WC dengan warung sekolah (kantin) 10 meter.
- Untuk menjaga kualitas air, bak dan reservoir air harus dikuras secara berkala.

4.1.3 Penyediaan fasilitas cuci tangan

Sekolah perlu mendorong warganya melakukan kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS) untuk mencegah penularan penyakit. CTPS perlu dibiasakan karena merupakan salah satu cara untuk hidup sehat paling sederhana dan murah. Dengan mengajarkan cuci tangan pakai sabun dan dilakukan secara rutin setiap hari akan membangun kesadaran siswa dan bentuk pembiasaan yang positif. Kriteria fasilitas cuci tangan yang baik mencakup:

- Tersedia air bersih yang mengalir.
- Tersedia sabun.
- Tersedia saluran pembuangan air bekas cuci tangan.

4.1.4 Sarana tempat sampah

Sekolah harus memfasilitasi warganya untuk terlibat dalam pengelolaan sampah, karena sampah yang tidak dikelola akan menurunkan kualitas lingkungan dan pada gilirannya akan mempengaruhi kesehatan warganya. Kriteria fasilitas tempat sampah yang memadai antara lain:

- Tersedia tempat sampah tertutup di setiap ruangan.
- Tersedia tempat penampungan sampah sementara (TPS) dan tertutup.
- Memfasilitasi praktik 3R, terutama **pengurangan** dan **pemilahan** sampah.
- Jarak antara TPS dari sumber air dan kantin sekolah minimal 10 meter.
- Pengumpulan sampah dari seluruh ruangan dan pembuangan ke TPS dilakukan setiap hari.
- Pembuangan sampah dari TPS ke tempat pembuangan sampah akhir dilakukan minimal tiga hari sekali.

4.1.5 Penyediaan saluran pembuangan air kotor

Sekolah harus punya sistem drainase yang baik untuk mengalirkan air buangan dari kamar mandi, tempat cuci, dapur, dan talang air, dan dari lain-lain (bukan dari peturasan/jamban) supaya air limpasan dapat tersimpan atau terserap ke dalam tanah, tidak menimbulkan genangan yang dapat menjadi medium penyebaran penyakit, serta tidak mengotori lingkungan permukiman. Kriteria saluran pembuangan air yang baik antara lain:

- Saluran sebaiknya tertutup dan mengalirkan air dengan lancar.
- Jika mungkin alirkan air limpasan ke sumur resapan yang tertutup. Jarak penampungan air buangan dari sumber air dan kantin sekolah minimal 10 meter.
- Saluran pembuangan/selokan yang terbuka harus dibersihkan minimal seminggu sekali.

4.2 Komponen *Demand* (Peningkatan Penyediaan Pendidikan Higienitas di Sekolah)

Komponen pendidikan kesehatan dan PHBS dalam program sanitasi sekolah dapat dijalankan dengan memberikan pengetahuan kesehatan kepada siswa serta menerapkan kebiasaan PHBS di lingkungan sekolah. Pembelajaran PHBS yang dapat disampaikan di sekolah terdiri dari cuci tangan pakai sabun, stop buang air membuang sampah pada tempatnya, air minum yang aman, gosok gigi secara rutin, serta manajemen kebersihan menstruasi, lebih rincinya sebagai berikut:

4.2.1 Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Sekolah dapat membiasakan peserta didik untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin pada saat setelah buang air besar, sebelum dan sesudah makan, setelah bermain, setelah memegang hewan, setelah mengganti pembalut, dan setelah beraktivitas lainnya. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melakukan kegiatan CTPS bersama-sama atau *group handwashing with soap*. Teknik ini dipercaya efektif dalam merubah dan membiasakan praktik cuci tangan pakai sabun karena menyenangkan⁶.

4.2.2 Buang Air Besar (BAB) di Jamban Sekolah

Peserta didik harus dibiasakan untuk tidak buang air besar sembarangan. Dengan tidak buang air besar sembarangan, maka lingkungan sekolah akan terhindar dari penularan penyakit diare. Selain diare, praktik buang air besar sembarang juga berpotensi menyebabkan penyakit lain, seperti demam tifoid dan cacangan. Selain Buang Air Besar di jamban, peserta didik perlu diberikan informasi untuk selalu menyiram jamban dan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir setiap kali selesai Buang Air Besar atau Buang Air Kecil.

4.2.3 Membuang sampah pada tempatnya

Sekolah dapat membiasakan membuang sampah pada tempatnya, melakukan pemilahan sampah, dan membuang sampah ke dalam tempat sampah (boks) yang sesuai:

- **Sampah organik** yaitu sampah yang berasal dari sisa makanan, sisa sayuran dan kulit buah-buahan, sisa ikan dan daging, sampah kebun (rumput, daun dan ranting).

⁶ The Compendium of Group Handwashing Facilities, 2016, UNICEF-GIZ

- **Sampah anorganik** yaitu sampah yang tidak mudah terurai atau membusuk berupa: kertas, kayu, kain, kaca, logam, plastik, karet dan tanah.

4.2.4 Manajemen Kebersihan Menstruasi

Menyediakan lingkungan yang mendukung dan nyaman bagi siswa perempuan pada saat menstruasi dengan cara:

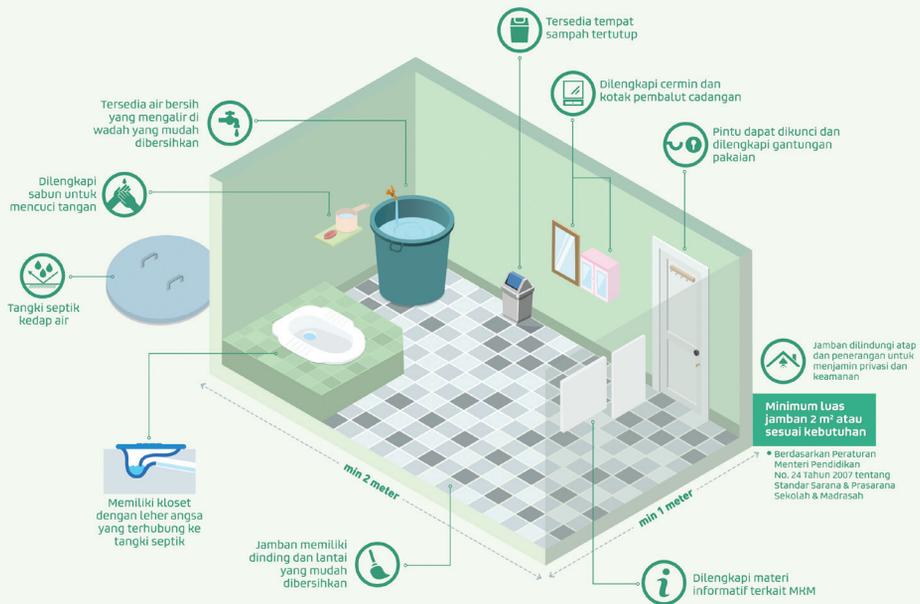
- Menyediakan informasi kebersihan menstruasi, seperti mengganti pembalut setiap 3-4 jam sekali.
- Menyediakan gantungan pakaian, tempat sampah tertutup, cermin, dan air mengalir di jamban khusus perempuan.
- Menyediakan pembalut cadangan di ruang UKS.



Sumber foto: UNICEF/2017

Rekomendasi Jamban Sekolah Ramah MKM

Pihak sekolah perlu mendorong ketersediaan fasilitas jamban yang ramah MKM untuk meningkatkan kenyamanan siswi perempuan saat mengalami menstruasi.



4.2.5 Air minum yang aman

Sekolah dapat membiasakan peserta didik untuk minum air yang aman diminum, yaitu yang telah direbus atau air dalam kemasan. Apabila sekolah tidak menyediakan air minum, siswa dapat membawa air minum mereka sendiri dari rumah. Kriteria yang harus dipenuhi:

- Selain jumlahnya harus memenuhi kebutuhan, air minum juga harus bebas dari kuman penyakit dan bahan-bahan berbahaya.
- Akses air minum tersedia di tiap ruangan kelas. Tempat penyimpanan air minum dan alat minum/gelas tersedia di tiap ruangan atau siswa dapat membawa gelas/botol mereka sendiri dari rumah.
- Alat minum/gelas dicuci setiap hari dan ditempatkan pada wadah tertutup.

4.3 Komponen Manajemen Sanitasi Berbasis Sekolah

Komponen manajemen sanitasi berbasis sekolah merupakan upaya menjamin kebersihan jamban dan pengelolaan sanitasi di sekolah yang berkelanjutan. Sekolah sebaiknya menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan memasukkan biaya operasional serta perawatan sarana sanitasi ke dalam rencana anggaran penggunaan dana BOS. Sekolah juga diharapkan dapat melibatkan peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan dan perencanaan pengembangan Sanitasi Sekolah. Lebih rinci mengenai komponen manajemen sekolah sebagai berikut:

4.3.1 Rencana kerja sekolah

Memastikan perencanaan kegiatan sanitasi sekolah masuk dalam Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS). Dinas Pendidikan dan Bappeda selanjutnya harus memastikan bahwa usulan-usulan sekolah melalui RKS dan RABS mendapat alokasi anggaran.

4.3.2 Operasional dan pemeliharaan

Rencana kegiatan sanitasi sekolah harus dipastikan masuk dalam agenda pertemuan antara komite sekolah dan pihak sekolah dengan memastikan biaya kegiatan, operasional dan perawatan seperti pembelian sabun, alat untuk kebersihan kamar mandi dan jamban, pembelian tempat sampah dan lain-lain masuk dalam RABS.

4.3.3 Peran serta masyarakat

Masyarakat termasuk orang tua murid bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru untuk merencanakan pembangunan sekolah dan memantau penggunaan sumber daya sekolah. Orang tua membantu sekolah dalam penyampaian informasi dan kegiatan PHBS, serta berkontribusi dana untuk menunjang kegiatan sekolah. Kader masyarakat membantu sekolah dalam pelaksanaan perbaikan sekolah. Alokasi Dana Desa juga dapat diusulkan untuk membantu sekolah.

4.4 Prinsip Dasar dan Pendekatan Pembangunan Sanitasi Sekolah

Pencapaian target penerapan Sanitasi Sekolah sesuai dengan indikatornya yang tertuang dalam *Peta Jalan* ini dilaksanakan dengan prinsip dan pendekatan baru, yaitu:



Gambar 4.2 Prinsip Pengembangan Sanitasi Sekolah

4.4.1 Partisipatif dan Tanggap Kebutuhan

Pendekatan ini juga disebut dengan *Demand-Driven* dan *Bottom Up*. Melalui pendekatan *demand-driven* dan *bottom up*, pembangunan Sanitasi Sekolah tidak berorientasi pada penyediaan sarana fisik semata. Ada proses perencanaan di tingkat sekolah untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik yang mungkin berbeda di masing-masing sekolah. Pola pendekatan ini, memotivasi masyarakat dan pihak sekolah untuk mencari solusi sendiri dengan menggali potensi yang ada. Sehingga peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat lebih sebagai fasilitator.

4.4.2 Terpadu

Sanitasi Sekolah sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Sanitasi Kabupaten/Kota Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Kabupaten/Kota yang menjalankan Program PPSP diharuskan untuk membuat Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Dengan adanya dokumen SSK maka pemerintah daerah memiliki perencanaan yang komprehensif mengatasi kebutuhan air minum, sanitasi, dan perilaku hidup bersih sehat. Karena ruang lingkup SSK adalah permukiman masyarakat, maka didorong agar pemerintah daerah bisa juga menyusun dokumen Strategi Sanitasi Sekolah (SSS). Sehingga pada akhirnya pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan juga memiliki perencanaan dalam memenuhi akses air minum, sanitasi, dan penyehatan lingkungan di sekolah yang berada di wilayahnya.

Sanitasi Sekolah juga merupakan bagian dari program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Melalui tiga pilar UKS, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan lingkungan sehat, maka dua pilar diantaranya terkait erat dengan Sanitasi Sekolah. Keterpaduan Sanitasi Sekolah pada program UKS juga dipertegas dalam Rencana Aksi Nasional Kesehatan

Usia Sekolah Dan Remaja Tahun 2017–2019 yang mencantumkan sanitasi dan kebersihan individu sebagai salah satu dari 8 isu prioritas terkait permasalahan kesehatan usia sekolah dan remaja di Indonesia.

4.4.3 Komprehensif dan Bagian dari Pendidikan Karakter

Sanitasi Sekolah sebagai bagian dari pembangunan karakter dan bersifat komprehensif (sarana sanitasi, perubahan perilaku, dan manajemen sekolah yang sensitif sanitasi). Dengan melakukan pendekatan yang komprehensif maka potensi daya ungkit untuk membuat perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) akan lebih besar. Keberlanjutan sarana Sanitasi Sekolah akan lebih dapat dipertanggungjawabkan jika manajemen sekolah dilibatkan sejak awal pembangunan. Sekolah diharapkan dapat memasukkan kegiatan kampanye PHBS dan perawatan sarana sanitasi dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah). Sehingga alokasi dana BOS dapat dipergunakan untuk merawat sarana sanitasi yang sudah terbangun.

4.4.4 Peka Kebutuhan Anak

Mulai tahun 2016 Direktorat PSD sudah memulai pembangunan jamban sekolah yang diletakkan di depan sekolah. Jamban dibuat dengan desain yang inovatif sehingga enak dipandang, bisa dijadikan sebagai taman dan tempat baca. Dengan adanya jamban di depan sekolah, diharapkan warga sekolah selalu menjaga kebersihan jamban tersebut.

4.4.5 Kemitraan

Kemitraan dengan berbagai unit organisasi baik pemerintah, LSM, maupun pihak swasta akan sangat mendukung pelaksanaan program promosi kesehatan sekolah. Di samping itu, dengan kemitraan dapat mendorong mobilisasi guna meningkatkan status kesehatan di sekolah. Kemitraan dengan masyarakat di sekitar sekolah merupakan hal yang ideal. Dengan terlibatnya masyarakat maka akan ada rasa memiliki terhadap program sanitasi sekolah, termasuk dengan menjaga fasilitas yang sudah dibangun misalnya jamban sekolah atau air. Sekolah juga dapat menjadi pusat informasi bagi masyarakat, sehingga pembiasaan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) yang sudah ditanamkan kepada peserta didik dapat diteruskan hingga ke keluarga dan masyarakat yang lebih luas.



Sumber foto: UNICEF/2017

Visi, Misi dan Kegiatan Strategis Pengembangan Kelembagaan

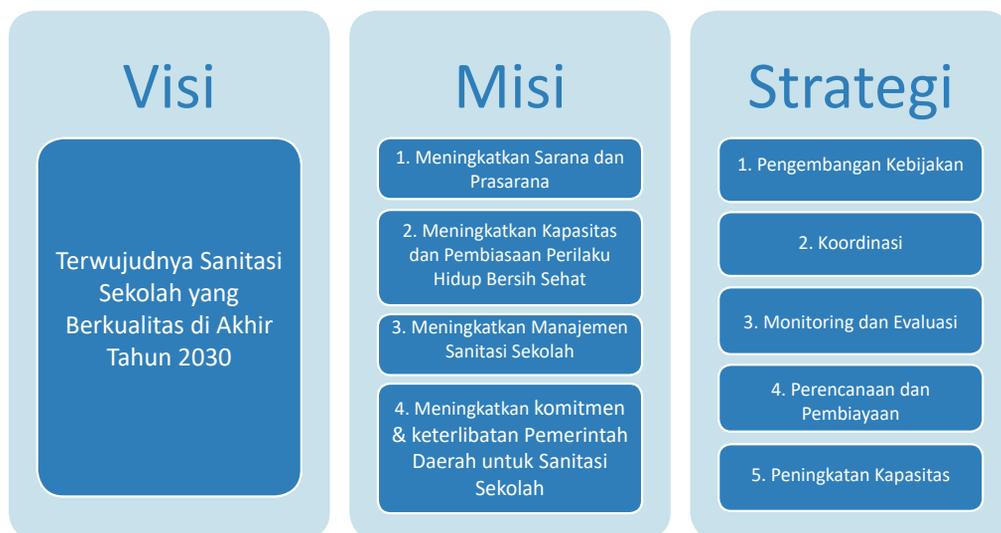
5.1 Visi dan Misi

Sesuai dengan hasil analisis situasi kelembagaan Sanitasi Sekolah pada bab sebelumnya, dan juga mengacu pada hasil Lokakarya Sanitasi Sekolah 7 Oktober 2016, maka disepakati visi, misi, dan strategi pembangunan Sanitasi Sekolah. Ada pun visi yang disepakati adalah, “Terwujudnya Sanitasi Sekolah yang Berkualitas di Akhir Tahun 2030.” Sementara dalam rangka mencapai visi tersebut, dirinci menjadi misi-misi berikut:

1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
2. Meningkatkan Kapasitas dan Pembiasaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
3. Meningkatkan Manajemen Sanitasi Sekolah
4. Meningkatkan Komitmen dan Keterlibatan Pemerintah Daerah untuk Sanitasi Sekolah

Sedangkan berdasarkan analisis SWOT atau *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threat* (ancaman), maka misi di atas dicapai dengan melakukan 5 strategi di bawah ini, yaitu:

1. **Mengembangkan kebijakan** yang partisipatif, peka kebutuhan anak, dan terpadu
2. **Meningkatkan Kelembagaan** Sanitasi Sekolah dengan memanfaatkan forum koordinasi yang sudah ada
3. Mendorong **penguatan sistem *monitoring* dan *evaluasi*** yang efektif dan efisien
4. **Mengembangkan perencanaan** dan memastikan tersedianya **pembiayaan Sanitasi Sekolah**
5. Melakukan **peningkatan kapasitas** pengelolaan Sanitasi Sekolah secara berjenjang, sistematis, terstruktur, dan terintegrasi

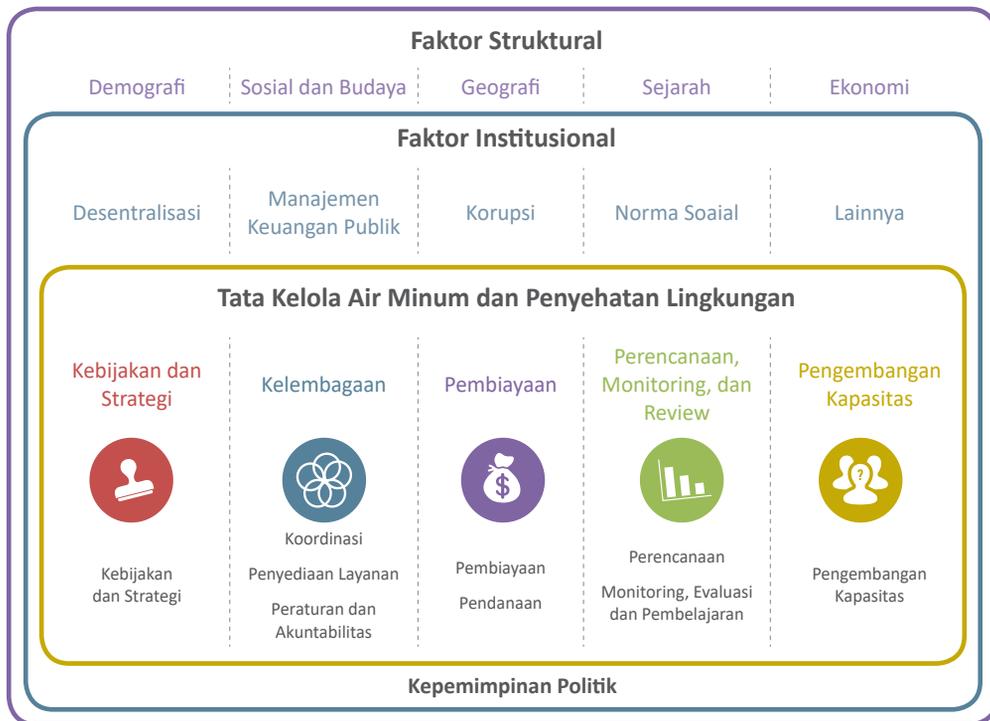


Gambar 5.1 Visi, Misi dan Strategi Pengembangan Sanitasi Sekolah

5.2 Strategi Pengembangan Sanitasi Sekolah

Strategi pengembangan tata kelola Sanitasi Sekolah memerlukan penanganannya yang lengkap dan terpadu, juga harus realistis dan terukur sehingga dapat dilaksanakan. Perbaikan Sanitasi Sekolah tidak dapat diselesaikan secara parsial. Pendekatan pengembangan tata kelola ini juga didasari oleh prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti mengurangi kesenjangan, memanfaatkan dan memperkuat sistem yang sudah ada, meningkatkan akuntabilitas, mempromosikan pembangunan yang berperspektif ketahanan pada perubahan iklim, dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk itu diperlukan sebuah kerangka konsep tata kelola Sanitasi Sekolah yang bersifat komprehensif. Kerangka konsep di bawah ini disadur dari kerangka konsep tata kelola pembangunan air dan sanitasi pada tingkat global⁷. Setidaknya ada lima komponen tata kelola Sanitasi Sekolah yang baik, yaitu kebijakan dan strategi, kelembagaan, pembiayaan, perencanaan, *monitoring* dan evaluasi, serta pengembangan kapasitas.

⁷ Strengthening Enabling Environment For water, sanitation, and hygiene (WASH): Guidance Note, May 2016, UNICEF



Gambar 5.2 Kerangka Konsep Tata Kelola Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

5.2.1 Pengembangan Kebijakan

Agar Sanitasi Sekolah dapat dilaksanakan secara konsisten dan sistematis, maka diperlukan kebijakan yang menjadi rujukan pelaksanaannya. Setidaknya ada dua payung kebijakan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan Sanitasi Sekolah. *Pertama*, program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), kedua, kebijakan Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat. Selain itu, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mendorong

pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Karakter (PPK). Untuk itu, pengembangan kebijakan Sanitasi Sekolah sedapat mungkin merujuk pada kebijakan-kebijakan yang sudah ada tersebut.

Selain bertumpu pada kebijakan yang sudah ada, diperlukan sebuah kebijakan khusus yang terkait pelaksanaan Sanitasi Sekolah. Beberapa produk kebijakan yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Sanitasi sekolah adalah:

1. Peraturan Menteri Pendidikan tentang Standar Sarana dan Prasarana
Peraturan Menteri Pendidikan sebelumnya ditetapkan pada tahun 2007, sehingga diperlukan perbaikan dan penyempurnaan.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Sanitasi Sekolah.
3. Panduan pelaksanaan Sanitasi Sekolah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

5.2.2 Kelembagaan

Seperti yang sudah disebutkan pada bagian kebijakan di atas, bahwa ada dua lembaga yang menangani sanitasi sekolah, yakni Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pokja Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Struktur UKS jelas dalam Peraturan Bersama 4 Menteri No.81 tahun 2014, bahwa terdapat Tim Pembina (TP) UKS Pusat, TP UKS Provinsi, TP UKS Kabupaten, TP UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS di sekolah. Sedangkan Pokja AMPL ada di tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Tim Pokja AMPL terdiri dari lintas dinas di provinsi dan kabupaten/kota. Namun, tidak semua kabupaten/kota memiliki Pokja AMPL dan hal yang sama terjadi dengan TP UKS di mana tidak semua kabupaten/ kota memiliki TP UKS yang aktif.

TP UKS Pusat yang terdiri dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama didorong untuk bekerja sama dan saling berkoordinasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian terkait UKS. Untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dapat digunakan jalur internet yakni dengan memperbaharui konten laman UKS yang sudah tersedia pada alamat dikdas.kemdikbud.go.id/uks. Selain itu, UKS juga membutuhkan sekretariat yang diharapkan dapat berlokasi di salah satu ruangan di kantor Kemdikbud. Setditjen Dikdasmen sedang mengusahakan agar sekretariat TP UKS Pusat berada di Senayan atau Fatmawati sesuai lokasi kantor Ditjen Dikdasmen.

Kemdikbud juga didorong agar dapat menjadi anggota Pokja AMPL Nasional yang dikoordinasikan oleh Bappenas dan terlibat dalam Program PPSP. Dengan melekat pada program nasional PPSP, maka sistem yang sudah ada dapat juga memprioritaskan Sanitasi Sekolah sehingga memiliki perencanaan dan anggaran khusus.

5.2.3 Monitoring dan Evaluasi

Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki satu unit khusus yang mengelola Dapodik, yang dinilai sudah sangat maju dan menjangkau data yang valid mengenai kondisi sekolah termasuk kondisi sarana sanitasi. Data dalam Dapodik sudah selayaknya dapat dianalisis dan menjadi masukan untuk perencanaan. Selain itu, Dapodik juga dapat menjadi alat untuk *monitoring* kondisi sarana sanitasi sekolah.

Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) sedang berusaha agar dalam tahun 2017 dapat menerbitkan profil sanitasi sekolah di Indonesia. Selanjutnya, diharapkan agar pemerintah daerah juga dapat menerbitkan profil sanitasi sekolah di tingkat provinsi dan kabupaten.

5.2.4 Perencanaan dan Pembiayaan

Saat ini Bappenas sedang mendorong penyusunan dokumen SSS pada tujuh kabupaten/kota di Indonesia yang sudah memiliki SSK. Dokumen SSS diharapkan dapat terintegrasi dengan SSK sehingga dapat menjadi program prioritas daerah dan mendapat alokasi APBD. Dengan menggunakan APBD, maka lebih banyak lagi sekolah yang mendapat bantuan pembangunan sarana sanitasi sekolah.

Sementara itu, fungsi dari pemerintah pusat adalah memilih sekolah yang mendapatkan bantuan pemerintah dengan sistem “reward” kepada kabupaten/kota yang memiliki perencanaan sanitasi sekolah atau dokumen SSS. Dengan demikian, sekolah rujukan atau sekolah model yang dibangun sanitasi sekolah dari pusat dapat berfungsi menjadi rujukan dan model untuk sarana sanitasi sekolah yang layak dan mencukupi sesuai standar kesehatan. Pusat membangun satu sekolah yang akan menjadi model dan daerah mereplikasi pada sekolah lainnya yang sudah menjadi prioritas berdasarkan perencanaan dalam dokumen SSS.

5.2.5 Peningkatan Kapasitas

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh direktorat terkait program UKS dan juga Setditjen sebagai Sekretariat TP UKS Pusat. Setditjen Dikdasmen dapat menginisiasi pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan UKS Provinsi. Misalnya dengan melatih TP UKS di 10 provinsi terlebih dahulu pada tahun 2018, lalu dilanjutkan 24 provinsi lainnya pada tahun 2019. Pelatihan tersebut bisa mengenai perencanaan kegiatan UKS yang terintegrasi antar anggotanya, meningkatkan koordinasi sesama anggota TP UKS, hingga berbagi pembiayaan untuk kegiatan UKS termasuk dengan sektor swasta (CSR).

Selain itu dalam pelaksanaan program Sanitasi Sekolah di direktorat, maka bisa dilakukan pengembangan panduan pelaksanaan atau petunjuk teknis Sanitasi Sekolah. Kegiatan yang bisa dilakukan antara lain penyusunan Panduan Sanitasi Sekolah bagi guru dan penyusunan Panduan Pelatihan Sanitasi Sekolah Bagi Dokter Kecil. Setelah adanya panduan atau modul tersebut maka sebaiknya terdapat pula fasilitator/pelatih yang melatih apa yang sudah tertulis di dalam panduan. Harapannya dapat tersedianya pelatih Sanitasi Sekolah di semua provinsi, misalnya dimulai pada tahun 2018 dengan pelatihan pelatih (*Training of Trainer*) pada 10 Provinsi, dilanjutkan pada tahun 2019 di 24 Provinsi.



Sumber foto: UNICEF/2017

Tabel 5.1 Strategi Pengembangan Sanitasi Sekolah

Strategi	Tujuan	Sasaran
Pengembangan Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan pembangunan Sanitasi Sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter 2. Menyusun panduan pelaksanaan Sanitasi Sekolah dalam kerangka UKS 3. Mengembangkan Sanitasi Sekolah dalam RPJMN dan Renstra Kemendikbud 2020-2024 4. Mendorong pembiayaan Sanitasi Sekolah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 5. Mempertegas alokasi penggunaan dana BOS untuk Sanitasi Sekolah pada jenjang SMP, SMA, SMK dan SLB 6. Meningkatkan komitmen Pemerintah Desa dalam prioritas penggunaan dana desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Dirjen tentang Pembangunan Sanitasi Sekolah ditandatangani tahun 2018 2. Panduan pelaksanaan Sanitasi Sekolah dalam kerangka UKS selesai bulan Desember 2017 3. RPJMN dan Renstra Kemdikbud disepakati dan dijadikan acuan dalam pengembangan Sanitasi Sekolah pada tahun 2020 4. Dokumen panduan pemanfaatan dana desa untuk Sanitasi Sekolah 5. Panduan alokasi BOS untuk Sanitasi Sekolah pada jenjang SMP, SMA, SMK dan SLB 6. Sanitasi Sekolah tercantum dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Tahun 2018 keatas
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevitalisasi Sekretariat TP UKS Pusat 2. Mengembangkan pengelolaan pengetahuan UKS 3. Melibatkan Kemdikbud secara aktif dalam Pokja AMPL Nasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat TP UKS Pusat dapat beroperasi pada tahun 2017 2. Website UKS dapat diakses pada Desember 2017 3. Kemdikbud menjadi bagian dari Program PPSP dan Pokja AMPL Nasional

Strategi	Tujuan	Sasaran
Monitoring Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Sanitasi Sekolah dalam Dapodik dianalisis dan dijadikan alat monitoring dan dasar perencanaan 2. Mengembangkan sistem dengan pendekatan reward and punishment 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil Sanitasi Sekolah tingkat nasional diterbitkan 2. Kualitas input data Sanitasi Sekolah meningkat 3. Pengembangan Profil Sanitasi Sekolah tingkat provinsi <p>Tahun 2018 → 10 Provinsi Tahun 2019 → 24 Provinsi</p>
Perencanaan dan Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Strategi Sanitasi Sekolah (SSS) menjadi bagian dari Strategi Sanitasi Kota/ Kabupaten (SSK) agar bisa ada internalisasi untuk alokasi APBD 2. Sistem “reward” kepada kabupaten yang memiliki perencanaan sanitasi sekolah 3. Mengalokasikan pembiayaan Pemerintah Pusat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Penyesunan SSS pada: Tahun 2018 → 10 Kabupaten/kota Tahun 2019 → 20 Kabupaten/kota Tahun 2020 → 50 kabupaten/kota Tahun 2021 → 50 kabupaten/kota Tahun 2022 → 50 kabupaten/kota Tahun 2023 → 100 kabupaten/kota Tahun 2024 → 100 kabupaten/kota Tahun 2025 → 70 kabupaten/kota (sisa yang belum)

Strategi	Tujuan	Sasaran
Peningkatan Kapasitas	Sanitasi Sekolah masuk dalam strategi komunikasi TP UKS Pusat, disusun bersama oleh sekretariat UKS Peningkatan kapasitas TP UKS Provinsi dan Kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Strategi Komunikasi dan material komunikasi Sanitasi Sekolah dalam kerangka UKS <ol style="list-style-type: none"> a. Strategi Sanitasi Sekolah b. Video Sanitasi Sekolah c. Video MKM d. Infografi Sanitasi Sekolah e. Sosial Media TP UKS Pusat 2. Pengembangan panduan pelaksanaan atau petunjuk teknis Sanitasi Sekolah <ol style="list-style-type: none"> a. Panduan Sanitasi Sekolah bagi guru b. Panduan pelatihan Sanitasi Sekolah bagi dokter kecil 3. Tersedianya Pelatih (ToT) Sanitasi Sekolah di semua provinsi Tahun 2018 → 10 Provinsi Tahun 2019 → 24 Provinsi 4. Pelatihan pengembangan kapasitas kelembagaan UKS Provinsi Tahun 2018 → 10 Provinsi Tahun 2019 → 24 Provinsi

Sumber: Hasil Analisis Strategi Pengembangan Sanitasi Sekolah

5.3 Kegiatan dan Target Jangka Pendek

Tabel 5.2 Kegiatan dan Target Jangka Pendek Sanitasi Sekolah dalam Kerangka UKS

Kegiatan	Tahun			Koordinator
	2017	2018	2019	
Pengembangan dan pemutakhiran kebijakan Sanitasi Sekolah				
Menyusun kebijakan pembangunan Sanitasi Sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter	√	√		Direktorat PSD, Sekretariat Direktorat Jenderal Dikdasmen,
Penyusunan panduan pelaksanaan Sanitasi Sekolah dalam kerangka UKS	√	√		Direktorat PSD
Penyusunan Konsep Sanitasi Sekolah dan <i>Peta Jalan</i> Sanitasi Sekolah		-	√	Sekretariat Dirjen Dikdasmen
Pengembangan Sanitasi Sekolah dalam RPJMN dan Renstra Kemendikbud 2020-2024				
Koordinasi				
Revitalisasi TP UKS Pusat	√	√		Sekretariat Dirjen Dikdasmen
Pengembangan pengelolaan pengetahuan UKS: Pengembangan <i>Website</i> UKS dan aktivasi Akun Media Sosial UKS	√	√		Sekretariat Dirjen Dikdasmen
Mendorong keterlibatan aktif Kemdikbud dalam Pokja AMPL Nasional	√	√	√	Direktorat PSD Sekretariat Dirjen Dikdasmen

Kegiatan	Tahun			Koordinator
	2017	2018	2019	
Pertemuan koordinasi nasional program Sanitasi Sekolah (<i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sanitasi Sekolah)		√		Sekretariat Dirjen Dikdasmen
Monitoring dan Evaluasi				
Profil Sanitasi Sekolah tingkat nasional diterbitkan	√			PDSP
Dukungan teknis peningkatan kualitas data sanitasi sekolah		√		Dapodik
Fasilitasi pengembangan profil Sanitasi Sekolah tingkat provinsi		10 provinsi	24 provinsi	PDSP
Pendanaan dan Pembiayaan				
Fasilitasi integrasi Strategi Sanitasi Sekolah (SSS) menjadi bagian dari Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK)		10 Kabupaten/kota	20 Kabupaten/kota	
Pengembangan sistem “reward” kepada kabupaten yang memiliki perencanaan sanitasi sekolah		20 Kabupaten/kota	50 Kabupaten/kota	
Peningkatan Kapasitas				
Pengembangan strategi komunikasi dan materi komunikasi Sanitasi Sekolah dalam kerangka UKS	√			
Peningkatan kampanye publik Sanitasi Sekolah dengan melibatkan media massa untuk mempengaruhi masyarakat sekolah dan pengambil keputusan di pemerintahan		√		
Pelatihan fasilitator program Sanitasi Sekolah tingkat nasional		√		

Sumber: Hasil Analisis Kebutuhan Kegiatan

5.4 Kegiatan Kelembagaan Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSD

Tabel 5.3 Rencana Kegiatan Pengembangan Sanitasi Sekolah di Direktorat Pembinaan SD

Strategi	Kegiatan 2017	Rencana 2018	Rencana 2019
Pengembangan Kebijakan dan Perencanaan	Penyusunan petunjuk teknis (juknis) sanitasi sekolah (komponen <i>hardware</i> atau pembangunan fisik sarana sanitasi sekolah)	Komponen manajemen sanitasi sekolah dan penguatan PHBS (<i>software</i>) dimasukkan dalam Juknis Sanitasi Sekolah Menawarkan kepada kabupaten/kota untuk mendapatkan dampingan penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Sekolah (SSS)	Juknis Sanitasi Sekolah menjabarkan tiga komponen lengkap dalam program sanitasi sekolah (<i>hardware, software, manajemen</i>)
Koordinasi	Terlibat aktif dalam Pokja AMPL Nasional dan pertemuan AKKOPSI (Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi); Kerjasama dengan UNICEF; <i>Pilot project</i> 8 Kabupaten/ Kota didampingi penyusunan dokumen SSS	Terlibat aktif dalam Pokja AMPL Nasional dan pertemuan AKKOPSI; Kerjasama dengan UNICEF; Bappenas untuk pendampingan penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Sekolah (SSS)	Terlibat aktif dalam Pokja AMPL Nasional dan pertemuan AKKOPSI; Kerjasama dengan UNICEF; Bappenas untuk pendampingan penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Sekolah (SSS)
Monitoring Evaluasi	Sistem Takola (Tata Kelola Sekolah) digunakan sebagai dasar perencanaan dan pemantauan	Sistem Takola (Tata Kelola Sekolah)	Sistem Takola (Tata Kelola Sekolah)

Pendanaan dan Pembiayaan	315 sekolah perwakilan kabupaten/kota mendapatkan dana bantuan sanitasi sekolah	Kabupaten/kota yang sudah menyusun SSS mendapatkan <i>reward</i> dana bantuan sanitasi sekolah	Kabupaten/kota yang sudah menyusun SSS mendapatkan <i>reward</i> dana bantuan sanitasi sekolah
Peningkatan Kapasitas	Bimbingan teknis bagi sekolah penerima bantuan pemerintah	Bimbingan teknis bagi sekolah penerima bantuan pemerintah Bimbingan teknis bagi kabupaten/ kota yang didampingi dalam pembuatan SSS	Bimbingan teknis bagi sekolah penerima bantuan pemerintah Bimbingan teknis bagi kabupaten/kota yang didampingi dalam pembuatan SSS

Sumber: Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar

5.5 Kegiatan Kelembagaan Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSMP

Tabel 5.4 Rencana Kegiatan Pengembangan Sanitasi Sekolah di Direktorat PSMP

Strategi	Kegiatan 2017	Rencana 2018	Rencana 2019
Pengembangan Kebijakan dan Perencanaan	Penyusunan Panduan Sanitasi Sekolah dalam Kerangka UKS untuk Tahun 2018	1. Pendataan dan Pemetaan Sekolah Sehat tahun 2018 2. Penggandaan Panduan Sanitasi tahun 2018	1. Pemetaan Sekolah Sehat Tahun 2019 2. Review Panduan Sanitasi Sekolah untuk Tahun 2019

Koordinasi	Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengenai pemetaan Sekolah Sehat Tingkat SMP yang akan dilaksanakan awal tahun 2018 (Surat menyurat, sosialisasi)	Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengenai hasil pemetaan Sekolah Sehat Tingkat SMP 2018 (Surat menyurat, sosialisasi)	Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengenai hasil pemetaan Sekolah Sehat Tingkat SMP 2019 (Surat menyurat, sosialisasi)
Monitoring Evaluasi	-	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi hasil pelaksanaan Sekolah Sehat Tingkat SMP tahun 2018	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi hasil pelaksanaan Sekolah Sehat Tingkat SMP tahun 2019
Pendanaan dan Pembiayaan	Mulai memasukkan anggaran kegiatan UKS tahun 2018 di dalam RKAKL 2018	1. Memasukkan anggaran kegiatan dalam RKAKL 2018 2. Merencanakan anggaran kegiatan 2019	1. Memasukkan anggaran kegiatan dalam RKAKL 2019 2. Merencanakan anggaran kegiatan 2020
Peningkatan Kapasitas	-	1. ToT Sanitasi Sekolah 2. Pelatihan (Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UKS SMP) Target: 100 Sekolah	1. ToT Sanitasi Sekolah 2. Pelatihan (Pengembangan Kapasitas Kelembagaan UKS SMP) Target: 100 Sekolah

Sumber: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

5.6 Kegiatan Kelembagaan Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSMK

Tabel 5.5 Rencana Kegiatan Pengembangan Sanitasi Sekolah di Direktorat PSMK

Strategi	Kegiatan 2017	Rencana 2018	Rencana 2019
Pengembangan Kebijakan dan Perencanaan	Penyusunan Draft Panduan Sanitasi Sekolah	Penyusunan Panduan Peningkatan Sanitasi dan UKS di SMK Penggandaan Panduan	Penerapan Panduan Peningkatan Sanitasi dan UKS di SMK
Koordinasi	Kerjasama dengan Kementerian Terkait, Dinas Terkait, MKKS, terkait dengan sekolah sehat tingkat SMK	Berkoordinasi dengan Kementerian Terkait, Dinas Terkait, MMKS tentang Pengembangan Sekolah Sehat	Berkoordinasi dengan Kementerian Terkait, Dinas Terkait, MMKS tentang Pengembangan Sekolah Sehat
Monitoring Evaluasi		Monitoring dan Evaluasi via on line pengembangan sanitasi dan UKS SMK dan kunjungan sampel ke sekolah	Monitoring dan Evaluasi via on line pengembangan sanitasi dan UKS SMK dan kunjungan sampel ke sekolah
Pendanaan dan Pembiayaan		125 sekolah perwakilan kabupaten/kota mendapatkan dana bantuan revitalisasi sekolah yang dapat dipergunakan untuk sanitasi sekolah dan UKS	250 sekolah perwakilan kabupaten/kota mendapatkan dana bantuan revitalisasi sekolah yang dapat dipergunakan untuk sanitasi sekolah dan UKS
Peningkatan Kapasitas		Bimbingan Teknis dan Pendampingan dengan Pelaksana UKS Sekolah	Bimbingan Teknis dan Pendampingan dengan Pelaksana UKS Sekolah

Sumber: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

5.7 Kegiatan Kelembagaan Sanitasi Sekolah pada Direktorat PSMA

Tabel 5.6 Rencana Kegiatan Pengembangan Sanitasi Sekolah di Direktorat PSMA

Strategi	Kegiatan 2017	Rencana 2018	Rencana 2019
Pengembangan Kebijakan dan Perencanaan	Kantin, Taman, Toilet (KTT) Naskah sanitasi sedang disusun. <i>Block grant/</i> Bantuan Pemerintah pendidikan karakter; untuk pengembangan fasilitas UKS yang termasuk bahan habis pakai.	Sosialisasi naskah Sanitasi Sekolah	Penerapan naskah Sanitasi Sekolah
Koordinasi	Kerja sama dengan organisasi/yayasan untuk pengembangan pendidikan karakter, kepemimpinan, dan HIV/AIDS. Program Sahabat Sekolah diteruskan, guna mendukung kerja sama dengan CSR	Sahabat Sekolah kerja sama dengan CSR	Sahabat Sekolah kerja sama dengan CSR

Monitoring Evaluasi	Supervisi USB dan revitalisasi	Supervisi USB dan revitalisasi	Supervisi USB dan revitalisasi
Pendanaan dan Pembiayaan	Satu paket 100 juta mengacu ke Permendikbud 24/2007, tersedia 182 paket. <i>Block grant</i> karakter sebesar 25 satu paket, maksimal 2 paket sekolah, tersedia 50 paket	<i>Reward</i> untuk sekolah LSS akan menjadi prioritas dalam menerima <i>block grant</i> karakter Tergantung ketersediaan dana	Tergantung ketersediaan dana
Peningkatan Kapasitas	Bimtek Ruang Penunjang ke 141 SMA Sekolah boleh membangun Kantin, Taman, Toilet (KTT), pagar sekolah sekitar 300 m, dan ruang parkir. <i>Juknis Block Grant Pendidikan Karakter</i> termasuk kantin sehat dan kegiatan UKS, kesehatan reproduksi, pelestarian lingkungan hidup	Materi Sosialisasi Kesehatan Reproduksi, HIV/AIDS, Narkoba pada pembekalan siswa olimpiade	Bimtek Ruang Penunjang ke sekolah boleh membangun Kantin, Taman, Toilet (KTT), pagar sekolah sekitar 300 m dan ruang parkir

Sumber: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas

5.8 Kegiatan Kelembagaan Sanitasi Sekolah pada Direktorat PKLK

Tabel 5.7 Rencana Kegiatan Pengembangan Sanitasi Sekolah di Direktorat PKLK

NO.	STRATEGI	KEGIATAN			KETERANGAN
		2017	2018	2019	
1	Pengembangan Kebijakan dan Perencanaan	Banper :	Banper :	Banper :	Tahun 2017 sanitasi sekolah tidak spesifik dalam banper tetapi menjadi bagian dari banper.
		USB SLB	USB SLB	USB SLB	
		Renovasi Sekolah	Renovasi Sekolah	Renovasi Sekolah	
		Revitalisasi SGD	Rehabilitasi dan/atau Infrastruktur Sekolah (Toilet Siswa)	Rehabilitasi dan/atau Infrastruktur Sekolah (Toilet Siswa)	Tahun 2018, program sanitasi akan masuk dalam banper Rehabilitasi dan/atau Infrastruktur serta masuk dalam DAK. Penyempurnaan jenis toilet siswa dan aksesibilitasnya
		Rehabilitasi dan/atau Infrastruktur Sekolah	Bappenas : DAK khusus untuk Sanitasi (Toilet/ Jamban Siswa)		
2	Koordinasi	KemenPUPR, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), UNICEF	KemenPUPR, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Kemenkes, PT, Bappenas, UNICEF	KemenPUPR, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Kemenkes, PT, UNICEF	KemenPUPR, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Kemenkes, PT, UNICEF

3	Monitoring Evaluasi	PKLK, TP4	PKLK, TP4	PKLK, TP4	PKLK, TP4
4	Pendanaan dan Pembiayaan	APBN	APBN, Bappenas	APBN	APBN
5	Peningkatan Kapasitas	Workshop : Pemeliharaan & Perawatan Gedung	WorkShop : Naskah Perencanaan Sanitasi Sekolah Naskah Pemeliharaan & Perawatan Sanitasi	WorkShop : Naskah Perencanaan Sanitasi Sekolah (review) Naskah Pemeliharaan & Perawatan Sanitasi (Review) Naskah Perencanaan UKS Naskah Pemeliharaan & Perawatan UKS	Workshop penyusunan Naskah perencanaan sanitasi sekolah dan penyusunan Naskah Pemeliharaan dan Perawatan Sanitasi Sekolah. Diharapkan adanya sinergi antara perencanaan, pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan sanitasi sekolah.

Sumber: Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Sanitasi Sekolah

TP UKS Pusat, TP UKS/M Provinsi, TP UKS/M Kabupaten/kota, UKS/M Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi untuk:

- a. Mengetahui proses penyelenggaraan program Sanitasi Sekolah dalam kerangka UKS;
- b. Memperoleh gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan Sanitasi Sekolah dalam kerangka UKS;
- c. Mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Sanitasi Sekolah dalam kerangka UKS;
- d. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Sanitasi Sekolah dalam kerangka UKS;
- e. Menilai dampak pelaksanaan kegiatan Sanitasi Sekolah dalam kerangka UKS terhadap peserta didik.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi dilakukan secara berjenjang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Tim pelaksana pemantauan juga memastikan data sanitasi sekolah dalam Dapodik sesuai kondisi di lapangan. Hasil pemantauan dan evaluasi dibahas dalam rapat koordinasi dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kegiatan di tahun mendatang.



Sumber foto: UNICEF/2017

